



**TINDAKAN PENYELAMATAN
DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
DI PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
CABANG SEMARANG PEMUDA**

T E S I S

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

oleh :

DWI RIYADI

B4B007058

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009

© DWI RIYADI, 2009

**TINDAKAN PENYELAMATAN
DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
DI PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
CABANG SEMARANG PEMUDA**

Disusun oleh :

Dwi Riyadi, S.H.

B4B 007 058

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 16 Maret 2009

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Pembimbing ,

Mengetahui,

Ketua Program Magister

Kenotariatan UNDIP

YUNANTO,S.H.,M.Hum
NIP. 131 689 627

H. KASHADI S.H.M.H.
NIP. 131 124 438.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama DWI RIYADI dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum Dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak Keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2009

Yang Menyatakan

DWI RIYADI

Kata Pengantar

Ungkap kasih serta puji syukur yang setinggi-tingginya dan sedalam-lamanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang tak terhingga yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan thesis ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis merasa dan menyadari bahwa penulisan thesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah bersedia memberikan banyak dukungan dan bantuan baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara moral ataupun moril kepada penulis. Penulis pada kesempatan ini dengan sepenuh hati menyampaikan rasa terima-kasih yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo, Med.SC.SP.And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Kashadi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang..
3. Bapak Mulyadi, S.H.,M.S, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang sampai Periode Tahun 2008.
4. Bapak Yunanto, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran dan banyak meluangka waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan masukan-masukan sehingga Tesisi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Yudianto Ahliawan, S.H, dan seluruh Staf Bagian Kredit PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang Pemuda.
6. Bapak Indarto Kunto Wicaksono, S.H., dan seluruh Staf Bagian Legal PT. Bank Danamon, Tbk. Cabang Semarang Pemuda.
7. Seluruh Staf Pengajar dan Tata Usaha pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang..
8. Bapak, Ibu, Istri, Anak-Anak, Kakak dan Adik-Adikku tercinta.
9. Kawan-kawan sejutiku yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa penulisan thesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, walaupun penulis dengan segala keterbatasan dan kekurangannya yang dimiliki telah berusaha untuk dapat menyelesaikan penulisan thesis ini. Penulis sangat mengharapkan dan akan sangat menghargai terhadap segala kritik dan saran dari para pembaca demi lebih tersempurnanya penulisan thesis ini. Akhir kata penulis berharap kiranya penulisan thesis ini akan dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca.

Semarang, Maret 2009

DWI RIYADI

ABSTRAK

Realita baru yang dihadapi dunia perbankan menunjukkan terjadinya kontraksi pasar yang memprihatinkan, suku bunga tinggi, likuiditas dan *cash flow* yang terbatas, penjualan merosot, debitur bermasalah meningkat, dunia perekonomian depresi, serta iklim usaha yang cenderung tidak menguntungkan. Secara berangsur mulai terdapat ketidakmampuan bayar Debitur, dikarenakan meningkatnya bunga pinjaman. Dalam kondisi yang demikian, bank Danamon mau tidak mau, siap tidak siap dihadapkan pada 2 (dua) pilihan antara untuk segera melakukan tindakan-tindakan *urgent* dan *antisipatif*, berupa tindakan penyelamatan dan penyelesaian kredit :

Kompleksitasnya permasalahan yang mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah baik karena faktor intern maupun faktor ekstern, akan menyulitkan bank untuk dapat menentukan apakah kredit bermasalah yang timbul harus dilakukan upaya tempuh penyelamatan atau penyelesaian kredit

Dalam penulisan ini agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, maka metode yang digunakan adalah yuridis empiris untuk menganalisa tentang tindakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank danamon Indonesia Tbk Cabang Semarang Pemuda.

Upaya Penyelamatan kreit yang dilakukan bank dalam rangka penentuan kebijakan kredit yang efektif dan efisien baik melalui *restructuring*, *reconditioning* ataupun *rescheduling* adalah sangat bergantung dari kemampuan *Account Officer* bank untuk terlebih dahulu melakukan analisa dan evaluasi secara *integral komprehensif* guna menemukan faktor utama yang mengakibatkan kredit debitur menjadi bermasalah, sehingga tindakan penyelamatan krdit dapat tercapai sesuai tujuan..

Tindakan penyelesaian kredit hanya akan dilaksanakan jika tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan bank tidak dapat memulihkan kualitas kredit debitur. Efektif dan effisiennya tindakan penyelesaian kredit untuk mendapatkan *maksimum recovery* seringkali justru dapat tercapai melalui upaya negosiasi yang sifatnya *persuasif* dengan melakukan *collection* secara berkala, dalam hal upaya *collection* tidak berhasil maka upaya awal yang dapat ditempuh oleh bank adalah dengan melakukan penjualan asset debitur/ penjamin secara sukarela, penyelesaian kredit melalui saluran hukum hendaknya baru dilakukan setelah bank terlebih dahulu melakukan approach secara person to person melalui negoisasi yang persuasif untuk menumbuhkan kesadaran debitur agar secara sukarela segera melunasi pinjaman hutangnya kepada bank. Upaya penyelesaian kredit melalui jalur peradilan sebagai "*the last action*" atau upaya akhir yang harus ditempuh manakala debitur/penjamin tidak bersedia melakukan penjualan asset secara sukarela.

Kata Kunci : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.

ABSTRACT

New reality faced by the banking shows the occurrence of market contraction, which is considered miserable, with the high rate interest, liquidity, and the limited cash flow, the decrease of the selling, the increase of uncooperative debtor, the depressed financial world, and the commerce climate that tends disadvantageous. Periodically, there is the incapability of the payment by the debtor caused by the increase of the interest rate. Upon the matter, Danamon Bank, accordingly, is faced to two choices either urgently completing urgent action or anticipative one, upon the form of recovering and the completing of credit.

The complexity of the matter that causes the uncooperative credit caused by either internal or external factors will cause trouble to the bank upon the matter of determining whether to recover or to complete the credit as the solving effort.

In order to obtain and review the data, the research used juridical empirical as the method to analyze the action of recovery and completion trouble in PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Semarang Pemuda Branch.

The effort of the credit recovery completed by the bank in order to establish the effective and efficient credit policy either through restructuring and reconditioning, or rescheduling. it depends on the capability of the Bank Account Officer to analyze and evaluate previously upon the integrally comprehensive way in order to find the main factor that causes the debtor's credit be uncooperative, so that the credit recovery action could accomplish the purposed gain.

The action of credit completion will only be completed if the action of the credit recovery is failed to recover the debtor's credit quality. The effectiveness and the efficiency of the credit completion action to achieve the maximum recovery could be accomplished through the persuasive negotiation effort by completing the continuous collection. In the case of the collection failure, the subsequent effort that shall be done by the bank is by selling the debtor's asset willingly. The credit completion through legal action is considered to be completed after the effort of the personal approach to reach agreement through the persuasive negotiation is done. The completion effort through the legal action is considered as the last action or the final effort that shall be completed if the debtor does not want to sell the assets willingly.

Key words: Recovery and Completion Credit trouble

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A . Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C.. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistimatis Penulisan	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjuan Umum Tentang Bank	18
1. Pengertian Bank	18
2. Fungsi Bank.....	20
3. Tujuan Bank	21
B. Perjanjian Kredit	21
1. Pengertian Perjanjian Kredit	21
2.. Isi Perjanjian Kredit	27
3. Jenis-Jenis Kredit	30
4. Tujuan dan Fungsi Kredit	34
5. Fungsi Perjanjian Kredit	36
C. Tahap-Tahap Pemberian Kredit	38
1 Aspek Penting Dalam Perjanjian Kredit	38
2 Proses Pemberian Kredit	43

3 Keputusan Pemberian Kredit	45
.4. Kredit Bermasalah	47
BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Sejarah PT. Bank Danamon, Tbk.....	51
1. Sejarah PT. Bank Danamon, Tbk	51
2. Layanan PT. Bank Danamon, Tbk	54
3. Visi, Misi , dan Nilai-Nilai PT. Bank Danamon, Tbk.....	55
B. Persyaratan Pemberian Kredit	56
1. Segmentasi	56
2. Prosedur Pemberian Krdit	59
3. Rekomendasi dan Keputusan Kredit.....	64
C. Tindakan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Debitur Bermasalah	66
1. Faktor-faktor Kredit Bermasalah	66
2. Aspek Hukum Penyelamatan Kredit Debitur Bermasalah	71
3. Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Debitur Bermasalah	81
4. Sistim Penanganan Kredit Debitur Brmasalah	100
BAB IV. PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran-Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

**TINDAKAN PENYELAMATAN
DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
DI PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
CABANG SEMARANG PEMUDA**

T E S I S

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Kenotariatan



Disusun oleh :
DWI RIYADI, SH
NIM : B4B007058

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**TINDAKAN PENYELAMATAN
DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
DI PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
CABANG SEMARANG PEMUDA**

**Disusun Guna Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun oleh :
Dwi Riyadi, S.H.
NIM : B4B007058

TANDA PENGESAHAN TESIS

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Ketua Program

Yunanto,S.H.,M.Hum

H. KASHADI S.H.,M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama DWI RIYADI dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

3. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum Dalam Daftar Pustaka.
4. Tidak Keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2009

Yang Menyatakan

DWI RIYADI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha, maka tantangan bangsa Indonesia di bidang perekonomian tentu saja juga semakin besar. Hal ini secara langsung mempengaruhi upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya.

Pembangunan nasional yang sudah berlangsung saat ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mendanai atau sebagai sumber pendanaan pembangunan perekonomian nasional.

Perbankan sebagai salah satu Lembaga keuangan, yang salah satu fungsinya sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit, sangatlah diperlukan untuk mendukung tercapainya pembangunan perekonomian Nasional.

Namun demikian, disaat upaya bangsa Indonesia menggalakan pertumbuhan ekonomi Nasional, gejala krisis ekonomi dunia sudah mulai nampak dengan melonjaknya harga minyak dunia. Hal ini berdampak pada kegiatan perekonomian, khususnya perbankan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya suku bunga pinjaman dan rendahnya daya beli masyarakat, sehingga tentu saja mempunyai dampak terhadap tingkat provitabilitas dunia perbankan. Realita baru yang dihadapi dunia perbankan menunjukkan terjadinya kontraksi pasar yang memprihatinkan, suku bunga tinggi, likuiditas dan *cash flow* yang terbatas, penjualan merosot, debitur bermasalah meningkat, dunia perekonomian depresi,

serta iklim usaha yang cenderung tidak menguntungkan. Secara berangsur mulai terdapat ketidakmampuan bayar Debitur, dikarenakan meningkatnya bunga pinjaman. Dalam kondisi yang demikian, bank mau tidak mau, siap tidak siap dihadapkan pada 2 (dua) pilihan antara untuk segera melakukan tindakan-tindakan *urgent* dan *antisipatif* sebagai berikut :

1. Tindakan penyelamatan kredit.
2. Tindakan penyelesaian kredit¹.

Dalam rangka meningkatkan *credit maximum recovery* serta menyelamatkan kredit dari para debitur yang mengalami kesulitan dalam pengembalian kreditnya yang antara lain disebabkan oleh kondisi politik dan ekonomi yang serba tidak menentu secara *financial* sangat berpengaruh dan mengganggu *cash flow* atau arus kas debitur serta guna menggerakkan perputaran roda bisnisnya. Upaya riil pada tahap awal yang ditempuh oleh pihak bank untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan *restrukturisasi* atas fasilitas kredit debitur. *Restrukturisasi* diharapkan dapat membantu debitur dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, untuk dapat segera kembali menggunakan dana yang diberikan oleh bank sebagai modal kerja dan sarana utama untuk menghidupkan kembali usahanya.

Fokus penanganan kredit sebagai *problem loan management* dalam rangka penyehatan atau penyelamatan kredit bermasalah dengan melalui *restructure portofolio* atas kredit debitur yang masih mempunyai prospek usaha

¹ Sub Divisi Remedial Kantor Pusat Bank Danamon, Penyelamatan Kredit Dalam Masa Krisis, (Sentra Pelatihan Wilayah 03 Bandung 1999), hlm.13

yang *feasible* tidak dapat terlepas begitu saja dari kapasitas dan kualitas dari para pejabat bank untuk dapat secara *integral komprehensif* serta secara akurat menentukan cara-cara yang efektif dan efisien untuk menyelamatkan dan atau menyelamatkan kredit debitur sehingga kewajibannya kepada bank dapat terpenuhi.

Keterpurukan dunia usaha dari para debitur bank sudah pada tingkat yang memprihatinkan. Banyak faktor yang mengakibatkan debitur mempunyai resiko gagal bayar, *fluktuatif* dan melemahnya nilai rupiah terhadap dollar secara *signifikan* juga sangat berpengaruh bagi pada debitur yang mempunyai fasilitas kredit dengan mata uang dollar. Hal lain pula yang tak pelak dapat dihindari adalah semakin meningkatnya biaya produksi baik secara operasional, mahalannya bahan baku dan bahan bakar maupun tingginya pengeluaran untuk pembayaran ongkos tenaga kerja masih harus ditanggung pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang kesemuanya tidak dibarengi dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Hal menarik yang harus diperhatikan adalah manakala prospek usaha debitur masih *feasible* dan menjanjikan *profit* serta debitur tersebut bersikap transparan dan kooperatif, seyogyanya atas fasilitas kredit debitur tersebut ditempuh upaya penyelamatan kredit baik berupa *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling* atau tindakan penyelamatan kredit lainnya.

Tidak semua kredit debitur yang bermasalah harus selalu diselamatkan, atas kredit debitur yang sudah tidak dapat lagi untuk diselamatkan maka upaya akhir sebagai “*the last action*” yang harus segera dilaksanakan atau ditempuh oleh bank adalah dengan melakukan upaya penyelesaian kredit, baik melalui

penyelesaian informal melalui “*the informal work out (TIWO)*” berupa upaya negosiasi ataupun dengan melalui “*collecting agency*” dalam hal ini menggunakan jasa *debt collector* . Upaya penyelesaian kredit yang sifatnya formal dapat ditempuh dengan melakukan penagihan melalui upaya litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur dan atau penjamin untuk membayar hutang ataupun dengan mengajukan permohonan eksekusi grosse akta atas agunan kredit milik debitur dan atau penjamin guna melunasi hutang dan kewajiban debitur kepada bank. *The last action* yang ditempuh oleh bank tidak selalu berjalan dengan mulus, karenanya diperlukan adanya suatu pemikiran yang matang dan cermat agar upaya tempuh penyelesaian kredit tersebut dapat berjalan lancar dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal.

Upaya-upaya penyelesaian kredit melalui prosedur hukum terutama pengadilan seringkali dalam pelaksanaannya ditemukan banyak kendala dalam penyelesaiannya, hal ini antara lain disebabkan :

- Proses beracara yang rumit dan lama karena menempuh birokrasi yang panjang serta terbukanya upaya-upaya hukum bagi pihak yang kurang puas atau berkeberatan terhadap isi putusan sampai akhirnya putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap atau telah “*in kracht van gewisjde*” .
- Persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga dapat merugikan nama baik dan mempengaruhi kredibilitas para pihak yang berperkara.
- Proses beracara di pengadilan membutuhkan biaya yang tidak murah.

- Putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim sulit untuk diduga.
- Di pihak bank dengan adanya kurang-empurnaan dokumen pembuktian dalam perjanjian hukum, akan mengakibatkan penyelesaiannya menjadi berlarut-larut.
- Terdapatnya silang pendapat di kalangan para juris untuk dapat atau tidaknya dilakukan penagihan hutang ataupun dilaksanakannya eksekusi atas agunan kredit pada fasilitas kredit yang belum jatuh tempo.

Banyaknya kendala-kendala yang harus dihadapi bank ketika harus beracara di pengadilan telah menimbulkan trauma dan keengganan tersendiri bagi bank untuk melakukan penyelesaian kredit melalui lembaga pengadilan. Bank pada saat awal akan melakukan penyelesaian kredit melalui lembaga pengadilan selalu memberikan tawaran kepada debitur untuk menjual sendiri agunan kreditnya secara sukarela, mencari solusi sumber pembayaran hutang ataupun mencari pihak ketiga baik melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang bersedia untuk melakukan pelunasan kredit debitur melalui cara *take over*.

Bank meskipun dalam dipersidangan dinyatakan menang namun dalam proses pelaksanaan putusan atau eksekusinya harus melalui proses rumit dan panjang. Berkepanjangannya proses beracara di pengadilan antara lain disebabkan oleh adanya bantahan ataupun perlawanan dari para pihak berperkara atau pihak ketiga lainnya, maupun karena digunakannya upaya hukum oleh para pihak berperkara yang merasa berkeberatan terhadap isi putusan. Semakin panjang dan

rumitnya upaya untuk melakukan penagihan hutang ataupun proses eksekusi atas fasilitas kredit debitur yang telah macet dan nyata-nyata tidak dapat untuk diselamatkan justru mengakibatkan kredit debitur akan menjadi semakin membengkak nilainya, karena terhadap kredit debitur tersebut tetap dibebani bunga dan denda sehingga total kewajiban hutang debitur yang harus dipenuhi kepada bank semakin hari akan menjadi semakin besar . Sebagai akibat adanya proses beracara yang rumit dan lama yang berakibat pula pada penyelesaian kredit yang berkepanjangan, perlu kiranya untuk diperhatikan secara serius adanya akumulasi penyusutan atau rusak dan musnahnya agunan kredit debitur dan ataupun milik penjamin, misalnya atas agunan kredit berupa barang-barang inventory yang tidak dapat tersimpan untuk waktu relatif lama sehingga ditakutkan akan rusak atau musnah dan akhirnya tidak akan laku dijual baik melalui pelelangan umum atau dilakukan penjualan secara sukarela.

B. Perumusan Masalah

Terpaan badai krisis ekonomi yang berkepanjangan secara makro, telah mengakibatkan semakin banyaknya kredit bermasalah ataupun meningkatnya *Non Performing Loan (NPL)* atas kredit yang telah dikururkan oleh bank, sehingga dalam kondisi yang serba tidak kondusif ini bank tidak mempunyai pilihan atau alternatif lain, untuk segera melakukan tindakan penyelamatan kredit ataupun tindakan penyelesaian kredit. Mencermati hal-hal yang demikian, maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimana Penyelamatan Kredit secara efektif dan efisien terhadap kredit debitur bermasalah ?

2. **Bagaimana Penyelesaian kredit debitur bermasalah secara efektif dan efisien dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal ?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulis sesuai dengan permasalahan diatas antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tindakan penyelamatan kredit yang efektif dan efisien dalam rangka penyelamatan kredit debitur bermasalah .
2. Mengetahui tindakan penyelesaian kredit yang efektif dan efisien dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi bank untuk secara lebih cermat dan selektif dalam memformulasikan penyelamatan kredit secara efektif dan efisien dalam rangka melakukan tindakan penyelamatan kredit debitur bermasalah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi bank untuk menemukan instrumen efektif dan efisien yang dapat ditempuh dalam rangka melakukan penyelesaian kredit debitur bermasalah dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal.

E. Sistimatis Penulisan.

Dalam tesis yang berjudul “Tindakan Penyelamatan Kredit Dan Penyelesaian Kredit Debitur Bermasalah Di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pemuda”, sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang Latar Belakang, Permasalahan yang dipilih, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Tinjauan Umum tentang Bank yang terdiri dari : Pengertian Bank, Fungsi Bank, Tujuan Bank.

Berisi Tinjauan Umum tentang Kredit yang terdiri dari : Pengertian Kredit, Sifat Perjanjian Kredit, Fungsi Kredit.

Berisi Perjanjian Kredit terdiri dari : Pengertian Perjanjian Kredit, Isi Perjanjian Kredit, Jenis-jenis Kredit, Fungsi Perjanjian Kredit, Tujuan Perjanjian Kredit.

Berisi Tahap-tahap Pemberian Kredit : Aspek Penting dalam Pemberian Kredit, Proses Pemberian Kredit, Keputusan Pemberian Kredit.

Bab III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampling, Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang Tinjauan Umum PT. Bank Danamon Indonesia , Tbk yang terdiri dari: Sejarah Bank Danamon, Layanan Bank Danamon, Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Danamon, dan Prestasi Bank Danamon.

Berisi tentang Persyaratan Pemberian Kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pemuda, yang terdiri dari Segmentasi Kredit, Proses Pemberian Kredit dan Rekomendasi dan keputusan Pemberian Kredit.

Berisi tentang Tindakan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, yang terdiri dari: Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah, Aspek Hukum Penyelamatan Kredit Debitur Bermasalah, Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Debitur Bermasalah, Sistem Penanganan Kredit Bermasalah

Bab V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan merupakan landasan untuk mengembangkan saran-saran.

- DAFTAR PUSTAKA
- LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1 Pengertian Bank.

Eksistensi lembaga perbankan sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mempunyai nilai dan posisi yang strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Kedudukannya bank sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana “*surplus of funds*” dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana “*lack of fund*” tidak dapat dipisahkan begitu saja seperti sebuah mata rantai yang tak terpisahkan. Pasal 1 butir 2 UU Perbankan tahun 1998 menyebutkan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dalam kaitan dengan tugas dan fungsi utamanya dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang selain tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, bank adalah juga suatu badan yang berkedudukan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.² Bank dalam kerangka operasional yang lebih luas selain berkedudukan sebagai “*agent of development*” dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan bank juga bertindak sebagai “*agent of trust*” dalam kaitannya

² Thomas Suyatno, Kelembagaan Bank, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum 1994) hlm.23

dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank baik kepada perorangan ataupun badan hukum.

Pasal 3 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan secara prinsip menjelaskan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Sesuai dengan fungsinya yang demikian maka terdapatlah dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah, yaitu hubungan hukum dalam kaitannya bank dengan nasabah penyimpan dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Pasal 1 butir 16 dan 18 UU No.10 Tahun 1998 menyebutkan :

Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Bank dalam kaitan dengan fungsinya sebagai penghimpun dana dan penyalur kredit juga mempunyai fungsi lainnya yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (*financial investment*).
- b. Mempermudah didalam lalu-lintas pembayaran uang.
- c. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran dan lain-lain.

- d. Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan deposito yang sewaktu-waktu dapat diuangkan (*demand deposit*) dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*).³

Dari banyaknya uraian-uraian tentang fungsi bank, maka dapat dipahami bahwa bank mempunyai fungsi yang sifatnya *multidimensional*, karena bank tidak semata-mata berfungsi sebagai penyimpan dana ataupun pemberi dana namun bank juga berfungsi sebagai *agent of development* dalam kaitannya sebagai salah satu bentuk upaya yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya maupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak .

2. Fungsi Bank

Sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dirubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Perbankan mempunyai fungsi pokok sebagai *finansial intermediasi* atau lembaga perantara keuangan serta mempunyai fungsi tambahan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Iswantoro, Bank mempunyai fungsi sebagai berikut:⁴

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*Financial Investment*);
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
- c. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;

³ Iswardono, *Info Bank "Fungsi Bank Dalam Pembangunan"* (Edisi Februari 1998) hlm.19

⁴ Iswardono, *Uang dan bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, Yogyakarta, BPFE, hal. 62.

- d. Menciptakan Kredit (*Credit Money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan *Demand Deposit* (Deposit yang dapat diuangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangan) *excess reserves*.

3. Tujuan Bank

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 diatur tentang Perbankan Indonesia, Tujuan Bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan/pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

B. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Bank berkaitan dengan fungsinya yang menyalurkan kredit kepada masyarakat harus mempunyai instrumen yang kuat agar kredit yang telah dikucurkannya kepada para debiturnya berada dalam posisi yang *secured*. Bank dalam rangka pengadministrasian dan pengamanan kredit pada awal pemberian kredit selalu didahului dengan penandatanganan perjanjian kredit oleh dan antara bank dan debitur. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu "*credere*" yang artinya percaya, kredit dapat diartikan juga sebagai pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.⁵ Dalam kaitannya dengan pemberian kredit dapat dipahami bank adalah berkedudukan sebagai kreditur yang dengan itikad baiknya mempercayai

⁵ H. Budi Untung, SH, MM, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi 2000), hlm.1

debitur dengan meminjamkan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian kredit menurut UU Perbankan No.9 tahun 1998 diartikan sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Mariam Darus Badruzaman menyamakan pengertian perjanjian kredit bank dengan perjanjian pinjam pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata dengan mengatakan bahwa:

Pinjam pengganti adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Konstruksi hukum yang terurai dalam Pasal 1745 tidak mengatur adanya pengaturan ketentuan tentang bunga karena pengembalian kredit yang disyaratkan hanyalah sebesar kredit yang telah dikucurkan.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Dalam KUH Perdata perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pendahuluan (*overeenkomst*) dari penyerahan uang.⁶ Perjanjian pendahuluan adalah hasil dari kesepakatan “*konsensus*” antara kreditur/bank dengan debitur/nasabah. Kesepakatan ini mengandung maksud bahwa diantara pihak yang bersangkutan, telah tercapai suatu kesesuaian kehendak yang artinya apa yang dikehendaki oleh dan antara para pihak telah tercapai suatu komitmen yang secara riilnya dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*) karena

⁶ Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung : Alumni 1978), hlm.28

realisasi perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang (perjanjian pinjam-mengganti), sedang perjanjian hutang-piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit.⁷

Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pendahuluan (*overeenkomst*) dari penyerahan uang. *Overeenkomst* dapat juga diterjemahkan dengan persetujuan, menurut R. Subekti *overeenkomst* berasal dari kata *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Perjanjian pendahuluan adalah hasil dari kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Perjanjian menganut asas *konsensualitas* dalam arti perjanjian itu lahir sejak adanya kesepakatan dari kedua-belah pihak yang bersangkutan. R. Subekti dan Achmat Ichsan lebih cenderung mengidentikkan *overeenkomst* dengan kata persetujuan sedangkan Utrech menterjemahkan “*overeenkomst*” dengan perjanjian.

Dalam perjanjian kredit pihak debitur adalah berkedudukan sebagai pihak yang menerima pinjaman, menjadi pemilik modal/ uang yang dipinjam dengan memberi kontraprestasi berupa bunga kepada kreditur selaku pihak yang meminjamkan modal/ uang. Hakekat dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata. Dalam perjanjian pinjam meminjam pihak yang meminjam tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Pasal 1759 KUH Perdata)

⁷ Hartono Pratiknyo, SH., Hutang Piutang, (Yogyakarta Mustika Wikasa), hlm. 3 dalam bukunya H. Budi Untung, SH, MM, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi , 2000)

dan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata), selain itu peminjam berkewajiban pula membayar bunga, karena undang-undang memperbolehkan diperjanjikannya bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaiannya (Pasal 1765 KUH Perdata).

Hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata menganut asas konsensualitas, yakni perjanjian itu lahir sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.⁸ Sejak adanya kata sepakat tersebut maka secara yuridis formal kreditur dan debitur telah mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.⁹

Perikatan itu adalah suatu hubungan hukum, artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Dengan demikian dalam perikatan terdapat suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam hal ini antara bank/kreditur dengan nasabah/debitur yang masing-masing pihak terikat pada hak dan kewajiban.

Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan persetujuan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian, kesepakatan adalah hal yang sangat penting, sebab jika antara kedua belah pihak ada yang merasa tidak bebas,

⁸ R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni 1982), hlm..28

⁹ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm..23

merasa dirugikan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹⁰

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif dikarenakan mengenai orang-orang atau para subyek yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat pertama dan kedua diancam dengan syarat batal relatif, selama perjanjian tersebut belum dibatalkan oleh hakim sehubungan adanya tuntutan pembatalan dari salah satu pihak maka perjanjian tersebut tetap berlaku mengikat bagi kedua-belah pihak. Syarat ketiga dan keempat tersebut diatas lebih dikenal dengan syarat obyektif karena berkaitan dengan perjanjian itu sendiri. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut diancam dengan syarat batal mutlak. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ketiga dan keempat adalah batal demi hukum karenanya perjanjian yang telah dibuat dinyatakan tidak pernah ada dan tidak berlaku mengikat bagi para pihak.

Perbedaan antara bentuk perjanjian pinjam meminjam dengan pinjam pakai dapat dibedakan bahwa apabila antara barang yang dipinjam itu menghabiskan atau musnah karena pemakaian, maka bentuk perjanjian itu adalah

¹⁰ Prof.R. Subekti,SH, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermassa, 1979), hlm.17

pinjam meminjam, sedangkan kalau tidak menghabiskan atau musnah karena pemakaian bentuk perjanjian tersebut adalah pinjam pakai.

Pasal 1741 KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam perjanjian pinjam pakai, pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjam dan obyek barang yang dipinjamkan tidak menghabiskan atau musnah karena pemakaian, sedangkan dalam perjanjian pinjam –meminjam pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1755 KUH Perdata.

Dalam perjanjian kredit, pihak debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman, menjadi pemilik modal/uang yang dipinjam, dengan kontraprestasi berupa bunga. Perjanjian kredit pada hakekatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sehingga dalam perjanjian kredit berlaku pula asas-asas dari hukum perjanjian. Meskipun menurut asas-asas dalam hukum perjanjian terdapat kebebasan bagi masing-masing dalam membuat perjanjian, namun kalau dilihat dalam realita penyusunan perjanjian kredit seolah-olah tidak terdapat kebebasan pada salah satu pihak. Syarat-syarat perjanjian pemberian kredit dalam suatu perjanjian kredit telah ditetapkan secara sepihak oleh bank yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak pemberi kredit/kreditur sehingga syarat kata sepakat atau kesesuaian pendapat “*asas konsensualisme*” yang ditentukan dalam Pasal 1320 untuk sahnyanya suatu perjanjian adalah tidak tercapai.

Dalam dunia perbankan secara yuridis formal perjanjian kredit dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Perjanjian kredit yang dibuat secara bawah-tangan atau akta dibawah tangan “*onderhands*”.
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris (notariil) atau akta otentik.

Bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lainnya tidaklah sama, karena disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing bank. Dalam praktek perbankan perjanjian standar sudah bukan merupakan hal yang asing didengar. Perjanjian standar digunakan karena gerak laju perbankan yang sangat cepat tidak dapat memungkinkan bagi para pihak untuk berlama-lama memformulasikan kehendaknya dalam suatu bentuk perjanjian tersendiri.

2. Isi Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh masing-masing bank adalah tidak selalu sama karena secara prinsip tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai standarisasi bentuk perjanjian kredit dalam form baku, namun demikian perlu diperhatikan adanya hal-hal prinsipil yang harus selalu ada dan dicermati dalam setiap perjanjian kredit antara lain sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit dapat dibuat secara dibawah tangan (*onderhans*) saja, dibawah tangan didaftarkan (*warmeker*), dibawah tangan yang dilegalisir ataupun dibuat secara notariil. Bagi kreditur perjanjian tersebut dapat pula dipakai sebagai alat bukti bahwa debitur telah meminjam uang/berhutang kepada kreditur.

2. Materi dan hal-hal lain yang menyangkut perjanjian kredit, antara lain:
- a. nomor, tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya perjanjian.
 - b. Pihak-pihak dalam perjanjian (*komparisi*)
 - c. Persetujuan :
 - (1) Suami / isteri dari debitur
 - (2) Persetujuan Komisaris / Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (untuk perseroan terbatas).
 - d. Jumlah, mata uang dan jenis kredit
 - e. Cara penarikan kredit
 - f. Tingkat suku bunga, provisi, denda, commitment fee
 - g. Biaya-biaya dan pajak yang menjadi tanggungan debitur
 - h. Jangka waktu / jatuh tempo perjanjian kredit
 - i. Cara pembayaran (hutang pokok dan bunga)
 - j. *Positive covenants* dan *negative covenants* (merupakan lampiran dari perjanjian kredit)
 - k. Ketentuan kelalaian (*events of default*)
 - l. Ketentuan pengalihan (*assignment*)
 - m. Janji memberikan agunan dari rincian agunan yang diperjanjikan akan diagunkan
 - n. Asuransi dan klasula yang mewajibkan adanya *Banker's Clause*
 - o. Kuasa yang diberikan oleh debitur (kuasa dari pemberi agunan yang bukan debitur harus dibuat tersendiri)
 - p. Syarat-syarat dan ketentuan lain
 - q. Alamat surat
 - r. Perubahan / penambahan perjanjian

- s. Pemilihan domisili hukum
 - t. Tanda tangan para pihak (notaris dan saksi-saksi, jika perjanjian kredit dibuat secara notariil)
 - u. Materai
 - v. Cap perusahaan (jika perlu)
3. Debitur selain harus tunduk pada syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kredit juga harus tunduk pada syarat-syarat umum pemberian kredit yang ditetapkan oleh Bank.
4. Selain syarat-syarat tersebut diatas Debitur juga diminta untuk memberikan *representations*, *warranties* dan *covenants*. Yang dimaksud *representations* adalah keterangan-keterangan yang benar yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun *warranties* adalah suatu janji, misal janji bahwa debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau asset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan *covenant* adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu seperti misalnya janji bahwa debitur tidak akan mengadakan merger dengan perusahaan lain.¹¹

Pada saat belum ditanda-tanganinya perjanjian kredit oleh dan antara bank dengan debitur maka *Legal Officer (LO)* bank harus mampu secara detail memformulasikan segenap hak-hak dan kepentingannya bank selaku kreditur secara maksimal dalam perjanjian kredit akan dibuat. Keahlian LO sebagai drafting dengan penguasaan materi hukum yang memadai akan dapat

¹¹ Ch. Gatot Wardoyo, Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen, (Nopember-Desember 1992), hlm..64

melindungi bank atas segenap hak dan kepentingan bank sebagaimana terurai dalam perjanjian kredit.

Dalam praktek dunia perbankan perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara debitur sudah diatur tersendiri dalam suatu format perjanjian yang dibuat oleh bank. Perjanjian standar merupakan suatu perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Bank untuk selanjutnya disodorkan kepada calon debitur dengan syarat-syarat baku dalam suatu formulir tersendiri yang tidak memberikan kesempatan bagi calon debitur untuk bernegosiasi mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh bank dalam rangka pemberian kreditnya kepada debitur. Tujuan bank dengan membuat suatu perjanjian kredit dalam bentuk yang sudah standart selain ditujukan untuk dapat mengikuti cepatnya gerak laju pemberian kredit juga diharapkan dapat dipakai sebagai secured instrumen bank atas kredit yang telah dikucurkan.

3. Jenis-Jenis Kredit.

Dari berbagai jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur, terdapat banyak tujuan dan manfaatnya. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan selaku pemberi pinjaman berharap akan memperoleh hasil dari kredit yang diberikan berupa keuntungan, dimana keuntungan ini diperoleh dengan pemungutan provisi, administrasi, bunga ataupun biaya-biaya lainnya. Tingkat keamanan bank sehubungan dengan kredit yang telah diberikan kepada debitur harus benar-benar terjamin sehingga tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan dapat tercapai tanpa adanya hambatan.

Jenis-jenis kredit dapat dilihat beberapa segi:

1. Dari segi lembaga pemberi –penerima kredit
2. Dari segi agunan kredit
3. Dari segi dokumen berharga
4. Dari segi besar kecilnya aktivitas usaha
5. Dari segi jangka waktu
6. Dari segi jaminannya.¹²

3.1. Dari segi lembaga pemberi–penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia maka jenis kredit ini terdiri dari :

- a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, atau konsumsi. Kredit itu diberikan oleh pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai kebutuhan hidup yang berupa barang ataupun jasa.
- b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
- c. Kredit langsung, kredit itu diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah.

3.2. Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari :

¹² Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung ; Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 221

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari.
- b. Kredit produktif :
 - Kredit investasi, kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi, yang jangka waktunya 5 (lima) tahun atau lebih.
 - Kredit eksploitasi, kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja baik berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir barang dalam proses produksi serta piutang, dengan jangka waktu kredit yang relatif berlaku pendek.
 - Perpaduan antara kredit konsumtif dengan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).

3.3. Dari segi dokumen, yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai sejumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak digunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat. Jenis kredit ini terdiri dari :

- a. Kredit ekspor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor.

- b. Kredit impor, adalah kebalikan dari kredit ekspor yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha impor.
- 3.4. Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sektor usaha yang digeluti dan aset yang dimiliki maka jenis kredit dikelompokkan menjadi :
- a. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil
 - b. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pengusaha kecil
 - c. Kredit besar, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pengusaha menengah.
- 3.5. Dari segi jangka waktunya jenis kredit dikelompokkan menjadi :
- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1(satu) tahun yang bentuknya dapat berupa rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli dan kredit wesel.
 - b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun, kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melaksanakan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.
- 3.6. Dari jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan :

- a. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*).

Kredit ini menurut UU No. 10 Tahun 1998 Jo UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mungkin saja bisa direalisasikan, karena UU ini tidak secara ketat menentukan bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan. Hanya disarankan dalam pemberian kredit bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya dengan yang diperjanjikan .

- b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*).

Yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur mendapatkan jaminan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Dalam rangka meminimalisir resiko gagal bayar dari debitur maka debitur selayaknya diwajibkan untuk memberikan jaminan baik jaminan yang sifatnya kebendaan ataupun jaminan perorangan.

4. Tujuan dan Fungsi Kredit

Dalam rangka mencapai tujuan untuk memperoleh hasil kredit yang baik, maka seluk beluk kegiatan bank untuk menjamin *rentabilitas* serta penjagaan posisi *likuiditas* perlu dilakukan dengan seksama dan *integral komprehensif*. Tujuan kredit mencakup jangkauan yang luas, dalam hal ini terdapat 2 (dua) hal pokok yang saling berkaitan dari kredit adalah :

1. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari pemungutan bunga.

2. *Safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti.¹³

Dilain pihak debitur dengan diterimanya kredit dari bank dapat menggunakan kredit tersebut untuk keperluan pengembangan usahanya, dilain pihak lainnya bank akan memperoleh keuntungan baik berupa bunga, provisi ataupun biaya-biaya lainnya yang dipungut bank atas kredit yang diberikan kepada debitur.

Pada awal pemberian kredit maka tujuan pemberian kredit adalah diarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak melakukan suatu hubungan yang saling menguntungkan “*mutualisme*” bagi kedua belah pihak untuk mencapai tujuan masing-masing. Pihak yang mendapatkan kredit harus bisa menunjukkan prestasi yang lebih tinggi dari kemajuan usahanya itu sendiri, sedangkan pihak yang memberikan kredit, secara material harus mendapat rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila, secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur selain mereka memperoleh keuntungan diharapkan dengan kredit yang telah dikucurkan juga akan mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara akan memberikan dan atau meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

¹³ Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar Teknik Manajemen, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hlm. 4

Kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan pada umumnya mempunyai fungsi :¹⁴

1. Meningkatkan daya guna uang/modal
2. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
3. Meningkatkan peredaran dan lalulintas uang
4. Meningkatkan kegairahan berusaha
5. Salah satu alat stabilitas ekonomi
6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

4. Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dalam kaitan dengan fungsinya sebagai *secured instrumen* sangat perlu mendapat perhatian khusus dan tersendiri dari para pihak baik oleh bank sebagai pemberi kredit maupun oleh nasabah sebagai debitur. Pentingnya perjanjian kredit adalah berkaitan dengan fungsinya yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

¹⁴ Ibid, hlm. 5

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.¹⁵

Dari banyaknya uraian-uraian tersebut diatas kiranya dapat dipahami kiranya bahwa perjanjian kredit secara prinsip mempunyai peran yang sangat penting, dominan dan strategis dalam rangka pengawasan, pengamanan dan atau penatalaksanaan dalam suatu pemberian kredit. Lengkapnya dokumen kredit.

Dalam relevansinya dengan tertib administrasi pada perjanjian kredit dapat digunakan sebagai instrumen pengaman "*secured instrument*" kredit yang telah dicairkan. Bank dengan perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditanda-tangani para pihak diharapkan dapat memperoleh payung hukum yang kuat serta ditempatkan pada posisi yang aman manakala debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada bank. Bank harus yakin bahwa segala hak dan kepentingannya telah terakomodir dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kredit.

¹⁵ CH. Gatot Wardoyo, Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen, hlm. 65 dalam bukunya H. Budi Untung SH, MM., Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi 2000), hlm. 43

C. Tahap-Tahap Proses Pemberian Kredit

1. Aspek-Aspek Penting dalam Pemberian Kredit.

Apabila seseorang atau suatu perusahaan selaku pemohon kredit mengajukan kredit kepada bank, maka biasanya permohonan itu tidak begitu saja diterima oleh bank, karena sebelum bank memberikan jawaban untuk menyetujui diberikan atau ditolaknya suatu permohonan kredit bank harus terlebih dahulu mengadakan proses seleksi (analisa pendahuluan), sesudah dilakukan analisa pendahuluan mengenai permohonan kredit maka sampailah pada putusan akhir apakah pemohon tersebut layak mendapat pinjaman atau tidak. Jika pemohon kredit itu dinilai layak untuk diberikan pinjaman maka bank akan segera mengkonfirmasi persetujuan pemberian kredit tersebut kepada calon debiturnya, ataupun sebaliknya jika ternyata bank menilai pemohon tidak layak diberikan kredit maka bank akan segera memberitahukan penolakannya kepada pemohon kredit.

Bank dalam memberikan kredit pada nasabah memerlukan data-data dan informasi akurat yang dimiliki dari calon penerima kredit. Data yang akurat mengenai kondisi *riil finansial* ataupun *non finansial* debitur sangat penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah dalam pengembalian kredit, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank untuk memberikan kredit kepada calon debitur. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyatakan :

Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bank guna memperoleh keyakinan atas pengembalian kredit yang telah dikucurkan tersebut maka sebelum memberikan kredit harus terlebih dahulu melakukan penelitian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha atau hal-hal lain yang terkait dalam rangka kepastian pengembalian kredit yang dikucurkannya.

Secara mendasar ada 5 (lima) faktor penting yang harus selalu diperhatikan oleh bank ketika bank memutuskan akan memberikan kredit kepada calon debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor mendasar tersebut lebih dikenal dengan sebutan "*The five of credit analysis*" atau prinsip 5 C's , namun ada juga yang menyebutnya sebagai prinsip 6 C's yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Character

Dasar pemberian kredit adalah adanya suatu kepercayaan. Bank harus yakin bahwa calon debitur dapat dipercaya untuk dapat mengelola kredit yang dikucurkan serta beritikad baik untuk melunasinya. *Character* merupakan keadaan watak atau sifat dari diri si peminjam baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usahanya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dan diteliti adalah mengenai :

- Riwayat hidup si Pemohon.
- Kebiasaan sehari-hari.
- Sifat-sifat pribadinya.

- Cara Hidup.
- Keadaan keluarganya.
- Hobby dan sosial kehidupannya.

Penilaian ini sangat berguna untuk mengetahui itikad baik peminjam dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit.

b. Capacity

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh profit yang selanjutnya atas keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi kewajiban hutangnya kepada bank. Bila kapasitas calon debitur berada dibawah standart utamanya atas kemampuannya untuk menggerakkan usaha maka hal ini justru akan menimbulkan keraguan tersendiri bank untuk mengucurkan kreditnya kepada calon debitur. Tingkat kapasitas dari calon debitur dapat diukur dari :

- Perkembangan keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun.
- Pemasaran dari hasil produksi.
- Kemungkinan pemasaran dari hasil produksi baru dan hasil produksi tersebut dapat dengan mudah diperdagangkan.
- Kemampuan usaha dibidang lainnya.

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui hasil atau keuntungan dari usaha calon debitur dalam kaitannya dengan kemampuan calon debitur

untuk mengembalikan kredit secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

c. Capital

Capital adalah dana yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Besarnya modal yang dimiliki oleh calon debitur merupakan hal yang sangat berpengaruh atas pengembalian kreditnya kepada bank utamanya pada saat seperti sekarang ini dimana dunia usaha dilanda oleh badai krisis. Dalam hal usaha debitur mengalami keterpurukan maka debitur sangat membutuhkan dana untuk dapat keluar dari keterpurukan tersebut sementara lain bank tidak dapat membantu debitur untuk memberikan kredit baru kepada debitur. Ukuran besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh debitur dapat terlihat pada neraca perusahaan yaitu pada komponen “*owner equity*”, laba yang ditahan dan lain-lain ataupun pada besarnya modal yang telah disetor dalam akta pendirian pada waktu perusahaan tersebut didirikan.

d. Collateral

Collateral adalah barang-barang baik milik debitur ataupun pihak ke-3 (tiga) yang diserahkan dan atau digunakan oleh debitur sebagai agunan kredit kepada bank. *Collateral* bermanfaat sebagai alat pengaman apabila usaha debitur yang dibiayai dengan kredit tersebut mengalami kegagalan atau karena sebab-sebab lainnya debitur tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya kepada bank. Jaminan ini mempunyai sifat pelengkap dari kelayakan keterlaksanaan (*feasibility*) dari suatu proyek debitur. Jaminan

tidak akan dapat memperbaiki tingkat kelayakan suatu proyek, namun agar proyek yang feasible tersebut menjadi *bankable* (dapat dibiayai dengan kredit dari bank) harus ada jaminan (*collateral*) tersebut.¹⁶

e. Condition of economy

Terciptanya kondisi ekonomi yang kondusif sangat berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. Kondisi ekonomi adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Berlarut-larutnya krisis ekonomi yang dibarengi dengan krisis politik yang berkepanjangan pada suatu negara yang pada akhirnya mengakibatkan lesunya dunia usaha akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan bayar debitur untuk melunasi kewajiban hutangnya kepada bank.

f. Constraint.

Pengertian *constraint* yang dimaksud disini yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Meskipun debitur telah memenuhi kriteria 5C yang ditetapkan namun demikian apabila prinsip ini dikesampingkan maka resiko gagal bayar dari debitur tidak akan dapat dihindari lagi. Permasalahan *constraint* agak sukar untuk dirumuskan karena tidak adanya peraturan

¹⁶ Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersial, (Yogyakarta BPFE 2000) hlm. 16.

tertulis yang mengaturnya dan terlebih permasalahannya juga tidak dapat selalu diidentifikasi secara fisik semata karena hal ini lebih menyangkut permasalahan moral.

Pihak bank sebelum mengucurkan fasilitas kredit selalu berusaha melakukan penilaian seksama dan menyeluruh terhadap *character, capacity, capital, collateral* dari calon debitur serta perlu diperhatikannya pula *condition of economy* pada saat itu atau prediksinya dimasa yang akan datang,. Salah satu langkah *preventif* yang dilaksanakan bank untuk dapat memperoleh pengembalian kredit yang maksimal adalah dengan bersikap hati-hati *prudential attitude* dan selektif dengan mensyaratkan calon debitur untuk menyerahkan jaminan yang memadai dan layak jual *marketable* miliknya atau penjamin sebagai agunan kredit. Persyaratan bagi debitur agar menyerahkan jaminan pada bank mengandung *dimensi moral obligation* bagi debitur untuk melunasi atau mengembalikan kreditnya kepada bank.

2. Proses Pemberian Kredit

Proses pemberian kredit merupakan suatu rangkaian tindakan yang terencana dengan menekankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola resiko kredit. Standart normal yang dilaksanakan pada saat awal akan dikucurkannya kredit haruslah selalu terencana dengan melakukan evaluasi, administrasi pembukuan, analisa pendahuluan dan melakukan deteksi awal terhadap segala kemungkinan yang timbul atas diberikannya kredit kepada debitur.

Banyak dimensi yang diketemukan pada setiap pemberian kredit, namun demikian ada 4 (empat) unsur pokok kredit yang harus selalu ada, terdiri atas :

1. Kepercayaan, dalam hal ini diartikan bahwa setiap pelepasan/ pemberian kredit harus selalu dilandasi dengan keyakinan oleh pihak bank bahwa kredit yang dikucurkannya akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
2. Waktu, dalam hal ini berarti antara pelepasan/ pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
3. Resiko, dalam hal ini berarti bahwa setiap pelepasan/ pemberian kredit jenis apapun akan terkandung resiko didalamnya, yaitu resiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali, hal ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.
4. Prestasi, dalam hal ini berarti bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dengan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi¹⁷.

Tingkat pengembalian kredit debitur kepada bank dapat didasarkan serta selalu mengacu pada *first way out* yaitu atas prospek usaha debitur atau didasarkan pada *second way out* dengan melihat *collateral coverage* atau kecukupan jaminan agunan milik debitur dan atau penjamin baik atas benda tidak tetap atau bergerak maupun benda tetap atau tidak bergerak berupa *fixed asset* yang digunakan sebagai agunan kredit debitur, sehingga manakala agunan kredit tersebut dieksekusi akan mampu menutup kewajiban hutang

¹⁷ Hasanudin Rahman, SH, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti1995), hlm.107

debitur kepada bank. Bank untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit harus terlebih dahulu mengadakan penelitian yang integral dan menyeluruh serta seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

3. Keputusan Pmberian Kredit

Apabila seseorang atau suatu perusahaan selaku pemohon kredit mengajukan kredit kepada bank, maka biasanya permohonan itu tidak begitu saja diterima oleh bank, karena sebelum bank memberikan jawaban untuk menyetujui diberikan atau ditolaknya suatu permohonan kredit bank harus terlebih dahulu mengadakan proses seleksi (analisa pendahuluan). Permohonan kredit yang diajukan oleh debitur harus memuat informasi yang lengkap dan jelas mengenai identitas calon debitur dan maksud serta tujuan penggunaan dana tersebut.

Analisa pendahuluan yang dilakukan oleh bank biasanya diawali dengan kunjungan-kunjungan pendahuluan kepada calon debitur, bank akan segera meninjau lokasi usaha dan atau lokasi agunan kredit. Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus ditindak-lanjuti dengan proses analisa kredit yang menyeluruh dan bersifat tertulis dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bentuk dan format dan kedalaman analisis kredit untuk setiap jenis kredit atau jumlah kredit yang diminta harus didarakan pada ketentuan yang berlaku.

- b. Analisis kredit telah menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit berdasarkan informasi yang memadai.
- c. Analisa kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, obyektif, tidak dipengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, tidak boleh merupakan formalitas dan dititikberatkan pada hasil usaha calon debitur serta menyajikan semua aspek yuridis perkreditan.
- d. Analisis kredit harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur serta penilaian terhadap sumber pelunasan kredit.
- e. Analisis kredit harus mencakup juga penilaian atas data kuantitatif, yaitu data laporan keuangan secara historis maupun proyeksi untuk mengetahui besarnya kebutuhan pembiayaan, sehingga kemungkinan terjadinya praktek mark up dapat dihindari. Pengolahan data keuangan ini harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan praktek yang lazim berlaku.
- f. Dalam kredit sindikasi, analisis kredit juga dilakukan terhadap bank yang bertindak sebagai bank induk.¹⁸

Analisa kredit yang disusun oleh AO disajikan dalam bentuk proposal kredit. Proposal kredit merupakan ikhtisar atas data fasilitas yang diberikan, data jaminan serta evaluasi kualitatif dan kuantitatif yang dibuat secara tertulis, sistematis, jelas, singkat dan informatif.

¹⁸ Bank Danamon, Kebijakan Perkreditan Bank Danamon, Proses Pemberian Kredit, (Jakarta: Agustus 2001) hlm. 5

Sesudah dilakukan analisa kredit mengenai permohonan kredit yang tersusun dalam proposal kredit maka sampailah pada putusan akhir apakah pemohon tersebut layak mendapat pinjaman atau tidak. Jika pemohon kredit itu dinilai layak untuk diberikan pinjaman maka bank akan segera mengkonfirmasi persetujuan pemberian kredit tersebut kepada calon debiturnya, ataupun sebaliknya jika ternyata bank menilai pemohon tidak layak diberikan kredit maka bank akan segera memberitahukan penolakannya kepada pemohon kredit. Pemberian keputusan kredit merupakan kesimpulan dari analisa kredit yang disusun oleh AO.

4. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan kredit macet, Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet atau kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi macet, sedangkan kredit macet adalah kredit yang atas angsuran pokoknya tidak dapat dilunasi lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan sehingga atas penyelesaian kreditnya diserahkan kepada Pengadilan ataupun BUPLN maupun

dengan pengajuan *claim* asuransi kredit kepada perusahaan asuransi yang mem-*back up* kredit debitur, dengan kata lain kredit macet merupakan kredit bermasalah namun tidak seluruhnya kredit bermasalah dapat dikatakan sebagai kredit macet. Upaya penyelesaian kredit macet tidak memberi alternatif lain selain melakukan eksekusi atas agunan kredit debitur atau penjamin maupun dengan mengajukan gugatan melalui lembaga pengadilan.

Kajian secara mendalam serta profesionalisme dari AO pada saat akan mengucurkan kredit akan dapat meminimal timbulnya resiko kredit bermasalah. Suatu kredit yang dikategorikan kredit bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitur atau usaha debitur yang dibiayai mengalami kesulitan *financial* dalam pengembalian kredit sebagaimana mestinya. Secara garis besar solusi atau upaya penanganan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya tempuh yaitu melalui tindakan :

1. Penyelamatan kredit.
2. Penyelesaian kredit.

Penyelamatan kredit adalah upaya penanganan kredit bermasalah yang sifatnya sementara “*temporer*” karena manakala upaya ini gagal maka upaya akhir yang ditempuh adalah upaya penyelesaian kredit. Upaya penyelamatan kredit dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring*. Penyelesaian kredit bermasalah merupakan upaya terakhir dari bank “*the last action*” untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, penagihan kredit kepada penjamin, pengambil-alihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur .

Tingkat resiko yang harus ditanggung oleh bank selaku kreditur sebagai akibat timbulnya kredit bermasalah atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban

pembayaran kredit oleh debitur dapat dikualifikasikan dengan menentukan parameter untuk penentuan kolektibilitas kredit, antara lain :

1. Ketepatan pembayaran dan atau pembayaran kembali terhadap bunga, pokok dan atau biaya-biaya lain yaitu :
 - a. Lancarnya (L) pembayaran kredit secara tepat waktu baik atas pokok maupun denda.
 - b. *Spesial mention/* Dalam Perhatian Khusus (DPK), yaitu kredit yang menunggak pokok atau bunga akan tetapi belum lewat 90 hari.
 - c. Kurang Lancar (KL), yaitu kredit yang telah menunggak lebih dari 90 hari, tapi belum lewat 180 hari.
 - d. Diragukan (D), yaitu kredit yang menunggak lebih dari 180 hari, akan tetapi belum lewat 270 hari;
 - e. Macet (M) yaitu kredit yang telah menunggak melebihi 270 hari.
2. Kepatuhan debitur terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit.
3. Nilai jaminan dikaitkan kemerosotan daya beli masyarakat.
4. Dokumentasi hukum terutama berkaitan dengan pemenuhan deviasi-deviasi dokumen yang disyaratkan.
5. Prospek usaha baik dilihat dari perkembangan kegiatan usahanya, maupun dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perkembangan keadaan dalam masyarakat.
6. Kecukupan sumber pembayaran kredit pasca pencairan kredit.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, baik berupa data primer maupun data sekunder. Hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan Tesis yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan lebih dulu, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan cara ilmiah, diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang obyektif, *valid* dan *reliable*.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode, ilmiah.¹⁹ Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

Sedangkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke" namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:²⁰

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah; sedangkan penelitian, adalah penyelidikan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode

¹⁹ Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research Jilid 1*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal 4.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1999/2000, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, Undip, hal 2

penelitian, dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.²¹

Dalam penelitian tentang *”Tindakan Penyelamatan Kredit Dan Penyelesaian Kredit Debitur Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pemuda”*, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum, karena masalah yang diteliti merupakan masalah hukum.

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan, adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. Lebih ditekankan pada studi normatif perundang-undangan mengenai *”Tindakan Penyelamatan Kredi Dan Penyelesaian Kredit Debitur Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pemuda”*, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian

²¹ Kartini Kartono, 1986, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, hal 15-16

lapangan yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) langsung dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.²²

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena beberapa pertimbangan yaitu : pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²³

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian, dalam hal ini berupa penggambaran mengenai "*Tindakan Penyelamatan Kredit Dan Penyelesaian Kredit Debitur Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pemuda*", sedangkan bersifat analitis ini karena gambaran tersebut akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan objek penelitian secara umum. Penggambaran yang dimaksud berupa "*Tindakan Penyelamatan Kredit Dan*

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 9.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 5.

Penyelesaian Kredit Debitur Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pemuda”,

C. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan wilayah tertentu sebagai lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pemuda. Lokasi penelitian ini dipilih karena PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk merupakan salah satu bank swasta terbesar dan telah ditetapkan sebagai bank jangkar oleh Bank Indonesia.

D. Populasi dan Metode Pengambilan Sampling

1. Populasi

Populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴

Jadi populasi dalam penelitian ini adalah semua yang memiliki hubungan dan berkaitan dengan proses pemberian kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pemuda yang mengalami permasalahan / Bermasalah yaitu segmen-segmen/divisi-divisi di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pemuda.

2. Sampel

Pengambilan sample, merupakan proses dengan memilih suatu bagian yang mewakili dari sebuah populasi. Sampel, adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.

²⁴ Sogiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hal 57

Dalam penelitian ini sampel akan diambil dengan menggunakan teknik *nonrandom sampling*, yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu.²⁵ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah divisi kredit, divisi legal, divisi kredit bermasalah.

3. Responden

Responden, adalah individu atau orang yang dijadikan sumber informasi dalam hal pengumpulan data. Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. 1 (satu) orang Bagian Kredit Bank Danamon Cabang Semarang Pemuda.
- b. 1 (satu) orang Bagian Kredit Bermasalah Bank Danamon Cabang Semarang Pemuda
- c. 1 (satu) orang Bagian Legal Bank Danamon Cabang Semarang Pemuda

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang hendak dirumuskan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk

²⁵ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.117

memperoleh data primer peneliti melakukan studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara (*interview*). Wawancara, adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pemberian kredit yang disyaratkan yang kemudian mengalami kendala pengembalian Kredit/Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pemuda.

2 Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Kitan Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sering dinamakan *Secondary* data yang antara lain mencakup didalamnya:

- a. Kepustakaan/buku literatur yang berhubungan dengan hukum jaminan
- b. Data tertulis yang lain berupa karya ilmiah para sarjana.
- c. Referensi-referensi yang relevan.

F. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul secara lengkap dan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara kualitatif yaitu analisis berupa kalimat dan uraian. Metode kualitatif, adalah menguji data dengan teori dan doktrin serta undang-undang. Dengan digunakannya metode kualitatif akan diperoleh suatu gambaran dan jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan dan menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan terbatas pada masalah yang diteliti.

Dengan demikian akan terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan teori yang melandasinya untuk mencari dan menemukan hubungan/relevansi antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang digunakan. Sehingga dapat menggambarkan dan memberikan kesimpulan umum mengenai *”Tindakan Penyelamatan Kredit Dan Penyelesaian Kredit Debitur Bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang Pemuda”*,

G. Metode Penyajian Data

Setelah semua data yang diperlukan itu terkumpul dan dirasa cukup, kemudian disusun secara teratur untuk selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk uraian. Terhadap data yang mendukung akan diuraikan. Sedemikian rupa, sedangkan terhadap data yang kurang relevan akan diabaikan. Hal ini dimaksudkan agar data yang telah diperoleh lebih mudah dipahami dan dimengerti, yang kemudian disusun dalam sebuah laporan penelitian.

Bab IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

A. Sejarah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

1. Sejarah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.,

Suksesnya pelaksanaan merger dan konsolidasi bank yang dilaksanakan oleh Bank Danamon pada tahun 2000 merupakan suatu peristiwa penting yang harus dicatat tersendiri dalam buku sejarah perbankan nasional di Indonesia. Bank Danamon didirikan di Jakarta pada tahun 1956 dengan menggunakan nama pertama kali PT. Bank Kopra Indonesia atau PT Indonesian Copra Banking Corporation Limited berdasarkan Akta No.134 tanggal 18 Juli 1956 yang dibuat oleh dan dihadapan Meester Raden Soedja, Notaris di Jakarta dan mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/40/8 tanggal 24 April 1957 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.46 tanggal 7 Juni 1957, Tambahan No.664.

Bank Danamon memperoleh izin usaha sebagai Bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.161259 tanggal 30 september 1958 dan selanjutnya menjadi Bank Devisa pada tanggal 5 Nopember 1988 berdasarkan Surat keputusan Bank Indonesia No.21/10/Dir/Upps.

Dalam perjalanannya seiring dengan adanya krisis ekonomi yang melanda dunia perbankan di Indonesia, Bank Danamon melalui Surat Keputusan Ketua BPPN No.8/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 tentang Pengambil-alihan Operasi Bank Danamon Dalam Rangka Program Penyehatan Bank, operasi dan pengelolaan Bank Danamon telah diambil alih oleh BPPN. Selanjutnya pada awal bulan Maret 1999 Bank Danamon melakukan Penawaran Umum Terbatas III yang

bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dengan mengeluarkan saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp.5 (lima) rupiah setiap saham.

Para pemegang saham Bank Danamon pada tanggal 31 Agustus 1999 telah menyetujui penggabungan usaha Bank Danamon dengan PT. Bank PDFCI Tbk., dimana Bank Danamon dalam proses penggabungan tersebut bertindak sebagai Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya Bank PDFCI masuk dan menggabungkan diri dengan Bank Danamon. Pada tanggal 20 Desember 1999 Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior BI No.1/16/KEP.DGS/1999 tanggal 20 Desember 1999, telah memberikan izin atas penggabungan usaha antara Bank Danamon dengan Bank PDFCI tersebut, yang atas izin tersebut berlaku efektif sejak tanggal 30 Desember 1999 sesuai persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank Danamon dalam rangka penggabungan usaha sebagaimana dituangkan dalam Akta No.31 tanggal 31 Agustus 1999 dan Akta No.2 tanggal 15 September 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Hendra Karyadi SH, Notaris di Jakarta.

Bank Danamon pasca penggabungan usaha dengan Bank PDFCI melebarkan sayapnya dengan melakukan kembali penggabungan usaha dengan 8 (delapan) BPM (Bank Peserta Merger) yang meliputi Bank Duta, Bank Rama, Bank Tamara, Bank Tiara, Bank Nusa Nasional, Bank Pos Nusantara, Bank Jaya dan Bank Risjad Salim International. Penggabungan bank-bank tersebut secara resmi dimulai pada tanggal 30 Juni 2000 dan Bank Danamon pada waktu itu hanya memiliki waktu sampai dengan Oktober 2000 atau kurang dari 4 (empat) bulan

untuk dapat menyelesaikan kegiatan merger yang cakupan permasalahannya meliputi masalah karyawan, produk, rasionalisasi cabang maupun sistem dan operasional perbankan dari 8 BPM.

Bank Danamon menjawab tantangan dengan keberhasilannya mencapai seluruh sasaran integrasi pasca merger pada tanggal 29 September 2000 sehingga Bank Danamon berhasil melaksanakan proses merger lebih cepat 2 (dua) minggu dari jadwal yang telah ditentukan pemerintah. Sungguh merupakan kesuksesan besar yang patut diberikan penghargaan tersendiri karena Bank Danamon melewati masa-masa merger tanpa dengan dihadapkan pada kesulitan yang terlalu berarti.

Bank Danamon selaku bank swasta terbesar nomor 2 (dua) di Indonesia berusaha memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya. Bank Danamon dalam rangka penyelenggaraan jasa-jasa perbankan memberikan berbagai jenis jasa keuangan untuk seluruh lapisan sektor usaha baik untuk perusahaan berskala besar (*korporasi*), menengah dan kecil (*komersial*) dan konsumen. Jenis jasa perbankan yang diberikan oleh Bank Danamon antara lain meliputi :

1. Penghimpunan dana melalui tabungan, giro dan deposito berjangka.
2. Pemberian fasilitas kredit dalam bentuk kredit program pemerintah, kredit konsumen, kredit ekspor, kredit investasi, kredit modal kerja, *trade finance*, pinjaman sindikasi, bank garansi dan kartu kredit.
3. Jasa-jasa perbankan lainnya seperti layanan ATM, pengiriman uang, perdagangan valas, pemrosesan transaksi kartu kredit, fasilitas pembayaran tagihan, pembayaran gaji dan safe deposit.

Bank Danamon hingga saat ini memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 1.400 kantor cabang termasuk Unit Unit Danamon Simpan Pinjam (DSP) Syariah dan Adira. Menyediakan akses nasabahnya kepada lebih 14.000 jaringan ATM. Termasuk melalui kerjasama dengan ATM Bersama dan ALTO. Jaringan kerja yang dimiliki Bank Danamon termasuk salah satu yang terbesar diantara bank-bank swasta lainnya di Indonesia karena tersebar di di seluruh propinsi dan mencakup sebagian besar kabupaten.

2. Layanan PT. Bank Danamon, Tbk.

Bank Danamon selaku bank swasta terbesar nomor 2 (dua) di Indonesia berusaha memberikan layanan terbaik kepada para nasabahnya. Bank Danamon dalam rangka penyelenggaraan jasa-jasa perbankan memberikan berbagai jenis jasa keuangan untuk seluruh lapisan sektor usaha baik untuk perusahaan berskala besar (*korporasi*), menengah dan kecil (*komersial*) dan konsumen. Jenis jasa perbankan yang diberikan oleh Bank Danamon antara lain meliputi²⁶.

1. Penghimpunan dana melalui tabungan, giro dan deposito berjangka.
2. Pemberian fasilitas kredit dalam bentuk kredit program pemerintah, kredit konsumen, kredit ekspor, kredit investasi, kredit modal kerja, *trade finance*, pinjaman sindikasi, bank garansi dan kartu kredit.

²⁶ www.danamon.co.id, “Layanan dan produk” yang diakses pada tanggal 17 Juli 2007

3. Jasa-jasa perbankan lainnya seperti layanan ATM, pengiriman uang, perdagangan valas, pemrosesan transaksi kartu kredit, fasilitas pembayaran tagihan, pembayaran gaji dan safe deposit.

3. Visi, Misi dan Nilai-nilai PT. Bank Danamon, Tbk.

Bank Danamon merupakan salah satu bank yang sangat berpegang teguh kepada visi, misi dan nilai yang sudah dicanangkan oleh manajemen Bank Danamon yaitu sebagai berikut :²⁷

- Visi Bank Danamon, adalah "Kita peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan".
- Misi Bank Danamon, adalah Danamon bertekad untuk menjadi "Lembaga Keuangan Terkemuka" di Indonesia yang keberadaannya diperhitungkan.
- Ciri khas Bank Danamon, adalah suatu organisasi yang terpusat pada nasabah, yang melayani semua segmen dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dan di dukung oleh teknologi kelas dunia.
- Aspirasi Bank Danamon, adalah menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya dan yang dihormati oleh nasabah, karyawan, pemegang saham, regulator dan komunitas dimana Bank Danamon berada.
- Nilai-nilai Bank Danamon, adalah Peduli, Jujur, Mengupayakan yang Terbaik, Kerjasama, Profesionalisme yang Disiplin

²⁷ www.danamon.co.id, "Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Danamon" yang diakses pada tanggal 17 Juli 2007

B. Persyaratan Pemberian Kredit di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

1. Segmentasi Kredit .

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, PT. Bank Danamon, Tbk. melakukan kebijakan-kebijakan internal untuk mengatur sehingga fungsi intermediasi tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan melakukan segmentasi dalam pemberian kredit sehingga di Bank Danamon dikenal pembagian divisi untuk produk kredit (*lending*) sebagai berikut :²⁸

a. Consumer Lending

Menangani kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membeli barang dan jasa yang bersifat konsumtif dengan sumber pembayaran kembali adalah dari gaji atau pendapatan dari peminjam (debitur) perorangan tersebut. Jenis kreditnya antara lain : Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Multi Guna (KMG), Kredit Kepemilikan Rumah Indent (KPR Indent), Kredit Perbaikan dan Pembangunan Rumah (KPPR). Semua jenis kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah dan dapat dilayani disemua cabang konvensional Bank Danamon.

b. Danamon Simpan Pinjam (DSP)

²⁸ Wawancara dengan Judianto Ahliawan, SE, Kepala Kredit Bank Danamon Cabang Semarang, 06 Juli 2007

Menangani kredit untuk perorangan, badan hukum atau badan usaha yang digunakan untuk menambah modal kerja maupun investasi dengan jumlah plafond kredit mulai Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Jenis Kreditnya antara lain : Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan Rekening Koran (RK). Semua jenis kredit yang diberikan dalam mata uang rupiah dan hanya dapat dilayani di kantor-kantor DSP (tidak dapat dilayani di kantor cabang *konvensional*).

c. *Small Medium Enterprise (SME) Lending*

Menangani kredit untuk perorangan, badan hukum atau badan usaha yang digunakan untuk menambah modal kerja maupun investasi dengan jumlah plafond kredit mulai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah). Jenis Kreditnya antara lain : Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan Rekening Koran (RK), Kredit Berjangka (KB), *Letter Of Credit* (L/C) dan lain-lain. Semua jenis kredit tersebut dapat diberikan dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing serta dilayani di kantor cabang utama PT. Bank Danamon,Tbk.

d. *Commercial Lending*

Menangani kredit untuk perorangan, badan hukum atau badan usaha yang digunakan untuk menambah modal kerja maupun investasi dengan jumlah plafond kredit mulai di atas Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).

Jenis Kreditnya antara lain : Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan Rekening Koran (RK), Kredit Berjangka (KB), *Letter Of Credit* (L/C) dan lain-lain. Semua jenis kredit tersebut dapat diberikan dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dan hanya dapat dilayani di kantor cabang utama yang berada di ibukota propinsi.

e. Corporate Lending

Menangani kredit untuk perusahaan yang berbentuk badan hukum atau badan usaha maupun *leasing company* yang digunakan untuk menambah modal kerja maupun investasi dengan jumlah plafond kredit di atas Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah). Jenis Kreditnya antara lain : Kredit Angsuran Berjangka (KAB) dan Rekening Koran (RK), Kredit Berjangka (KB), *Letter Of Credit* (L/C) dan lain-lain. Semua jenis kredit tersebut dapat diberikan dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dan hanya dapat dilayani di Kantor Pusat Bank Danamon di Jakarta.

Segmentasi tersebut bertujuan agar masing-masing divisi/segmen dapat lebih fokus kepada target market masing-masing karena telah diatur mengenai jenis pembiayaan maupun besarnya plafond kredit masing-masing debitur.

Setelah segmentasi ini berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini terlihat bahwa kinerja Bank Danamon makin meningkat kalau dilihat dari pertumbuhan kredit dengan semakin meningkatnya Loan to Deposit Ration (LDR) yang diiringi dengan meningkatnya keuntungan

yang tampak dari ratio-ratio keuangan yang makin meningkat dan harga saham Bank Danamon.

2. Prosedur Pemberian Kredit di Bank Danamon.

Setiap pengajuan kredit dari calon debitur akan ditangani oleh seorang *Account Officer* (AO) atau *Marketing Officer* (MO). AO/MO adalah karyawan bagian kredit yang menangani dan bertanggung-jawab terhadap kredit dengan plafond diatas Rp.350.000.000,- atau kategori *corporate* sedangkan MO bertanggung-jawab terhadap kredit *retail* dan usaha kecil dengan jumlah plafond sampai dengan Rp.350.000.000,-. Dalam memproses setiap pinjaman kredit, maka setiap AO/MO akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Identifikasi Calon Debitur.

Calon debitur dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *walk in customer* dan *by reference or prospect list customer*.

Walk in customer adalah calon debitur yang datang dengan sendirinya ke Bank (mungkin karena iklan atau keinginan sendiri atau coba-coba), sedangkan jenis yang kedua merupakan calon debitur yang didapatkan dari kunjungan yang dilakukan oleh AO/MO atas dasar informasi atau referensi dari nasabah atau pihak lain. Identifikasi calon debitur diperlukan untuk menggali informasi selengkap-lengkapunya perihal kebutuhan dan produk kredit yang diinginkan serta informasi lain yang relevan termasuk pula mengenai perilaku dan karakter dari calon debitur.

2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi.

Kelengkapan persyaratan administrasi sangat diperlukan untuk memasuki tahapan berikutnya dalam rangka evaluasi data-data debitur. Kelengkapan persyaratan ini akan berbeda untuk debitur perorangan atau badan usaha.

3. Melakukan penilaian jaminan (*appraisal*).

Proses penilaian jaminan dilakukan oleh seorang *appraiser* dari bagian kredit. Penilaian jaminan diperlukan untuk mengetahui nilai dari jaminan serta kondisi jaminan yang sesungguhnya untuk menentukan kelayakan dari jaminan tersebut.

4. Membuat proposal kelayakan kredit.

Setelah semua data yang diperlukan telah dipenuhi dan atau diperoleh, maka tindakan selanjutnya adalah dengan melakukan penyusunan proposal kelayakan kredit oleh AO/MO dalam bentuk *Credit Fasilitas Report* (CFR) dan Memorandum Analisa Kredit (MAK). CFR dan MAK memuat informasi sebagai berikut:

a. Tujuan pengajuan kredit dan sumber pembayaran kembali.

Bagian ini menjelaskan tentang penggunaan kredit (untuk modal kerja atau investasi) dan darimana sumber pembayaran kembali atas kredit yang diberikan.

b. Latar-belakang, riwayat usaha dan manajemen calon debitur.

Memuat tentang latar belakang dan riwayat usaha debitur sejak pertama kali menerjuni bisnisnya hingga saat ini serta pola manajemen yang diterapkan.

c. Kegiatan usaha.

Menjelaskan tentang seluk beluk bisnis yang digeluti dengan menggunakan konsep ACC (*Assets Conversion Cycle*) atau siklus perubahan asset dari kas hingga menjadi kas kembali. Bagian ini juga menceritakan tentang sistem pembelian (*supply*) dan penjualan (*omset*), sistem persediaan dan informasi lainnya seputar bisnis calon debitur.

d. Hubungan bank .

Bagian ini menjelaskan tentang pengalaman calon debitur dalam berhubungan dengan pihak perbankan serta bagaimana *track record*-nya selama ini.

e. Analisis Rekening Koran.

Dengan menggunakan perangkat *soft ware* yang tersedia, AO/MO melakukan analisis terhadap aktivitas keuangan usaha dari calon debitur yang tercermin dari rekening korannya. Dari hasil analisis ini dapat diketahui berbagai informasi berharga seperti : perkiraan omset, harga pokok penjualan (HPP), volume bisnis termasuk karakter dalam berhubungan dengan bank.

f. Analisis Laporan Keuangan

Bagian ini memaparkan hasil analisis terhadap laporan keuangan dari calon debitur. Terhadap calon debitur yang tidak mempunyai laporan keuangan, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban AO/MO untuk membuat laporan perkiraan keuangan atau yang disebut laporan keuangan *proformal*. Dengan menggunakan *software* program komputer yang tersedia maka informasi dalam setiap laporan keuangan akan diolah dan disajikan hasilnya .

g. Analisis Karakter

Untuk mengetahui watak atau karakter dari calon debitur maka seorang AO melakukan penyelidikan melalui media yang dikenal dengan *trade checking*, *personal checking* atau *bank checking*. *Trade checking* terutama dilakukan pada *supplier* dan mitra bisnis lainnya untuk mengetahui hubungan bisnis yang terjalin selama ini, *personal checking* biasanya dilakukan pada orang dekat yang tidak terkait dengan bisnis sedangkan *bank checking* dilakukan antar bank untuk mengetahui karakter dalam berhubungan dengan pihak perbankan.

h. Analisis kelayakan agunan.

Bagian ini menjelaskan tentang kondisi dari bakal agunan yang dilihat dari kondisi jaminan, nilai, tingkat *marketabilitas* dan hal-hal lain sehingga jaminan tersebut dapat atau tidak dapat diterima sebagai jaminan atas kredit yang diminta.

i. Analisis Resiko.

Memaparkan tentang berbagai resiko yang besar kemungkinan akan ditanggung bank dengan kondisi yang ada serta langkah litigasi yang ada. Analisis resiko biasanya mencakup *supply risk*, *demand risk*, *production risk*, *mikro* and *makro risk* dll.

j. Kesimpulan dan rekomendasi.

Pada bagian akhir AO/MO memberikan kesimpulan atas hasil analisisnya dan memberikan rekomendasi atas proses kredit tersebut kepada pemutus kredit, pemutus kredit yang berupa tim atau komite yang terdiri dari 2 orang pejabat kredit akan melakukan *review* atas proposal kredit untuk kemudian memberikan keputusan atas pengajuan kredit tersebut.

Setiap pemberian kredit selalu mengharapakan kredit tersebut dapat kembali dimasa mendatang, sedangkan pemberian kredit selalu dihadapkan pada resiko dan kondisi yang penuh dengan ketidak-pastian. Setiap kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko sehingga setiap proses pemberian kredit harus selalu memperhatikan asas perkreditan yang berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk meminimase timbulnya kredit bermasalah.

Kebijakan pokok perkreditan harus didasarkan pada asas perkreditan yang sehat dan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, yang selanjutnya berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut maka harus diformulasikan suatu kebijakan kredit yang efektif dan efisien agar dapat menghasilkan kualitas kredit yang baik. Adapun pada intinya setiap proses pemberian kredit wajib memperhatikan:

- a. Prosedur perkreditan yang sehat termasuk prosedur pemberian kredit, prosedur dokumentasi, administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit yang berkelanjutan.
- b. Pemantaun, pembinaan dan pengawasan yang intensif terutama terhadap kredit yang bermasalah agar menjadi lancar kembali.
- c. Tidak diberikannya fasilitas kredit yang sifatnya mengkapitalisasi tunggakan pokok atau bunga kredit (*plafondering*).
- d. Proses pelaksanaan restrukturisasi kredit harus dilakukan secara integral komprehensif dalam rangka penyelamatan kredit.

Apabila para pejabat-pejabat kredit pada saat pemberian kredit menjalankan ketentuan-ketentuan kebijakan kredit secara benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka tingginya angka kredit bermasalah akan dapat ditekan seminimal mungkin.

3. Rekomendasi Dan Keputusan Pemberian Kredit.

Rekomendasi kredit menyimpulkan kredibilitas nasabah/ calon debitur untuk menerima kredit maupun ketidak-layakan kredit dan usahanya tersebut, pada bagian ini harus dikemukakan alasan-alasan diterima maupun ditolakny sebuah kredit meliputi :

- Kelayakan usaha nasabah dari bisnis yang ditekuninya, termasuk mengenai manajemen usaha dan kesehatan serta *soliditas* keuangan.

- Karakter nasabah dan kapasitas usaha untuk mengcover kreditnya (*recover capacity*)
- *Product marketability and competition.*
- Tujuan spesifik dari fasilitas kredit yang diberikan.
- Kondisi marketibilitas dan kecukupan nilai jaminan untuk mengcover fasilitas kredit.
- *Cash flow projection* dan asumsi dasarnya.

Keputusan kredit diambil oleh Komite Kredit yang terdiri dari Pemimpin Cabang dan Wakil Pemimpin Cabang Bidang Marketing serta 1 (satu) orang AO Senior berdasarkan atas proposal CFR dan MAK yang diajukan AO/MO dan telah direview oleh komite kredit tersebut. Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) diberikan langsung oleh Direksi atas dasar kepercayaan dan kemampuan seseorang pemegang BWMK tersebut. Jumlah BWMK-pun tidak sama karena tergantung pada pengalaman dan tingkat kepercayaan yang diberikan. Setelah melakukan review atas setiap proposal pengajuan kredit (CFR dan MAK), maka Komite Kredit akan menetapkan keputusan kredit tersebut dan dituangkan dalam Memorandum Keputusan Kredit, untuk selanjutnya dapat dilakukan realisasi kredit. Apabila terdapat deviasi pada saat realisasi kredit maka untuk untuk pencairan kreditnya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari komite kredit setingkat diatas komite kredit yang menyetujui kredit.

Bank Danamon dalam rangka terciptanya proses pemberian kredit yang sehat menempuh kebijakan pengendalian internal pemberian kredit yang dimulai

tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai dengan tahap pelunasan pinjaman. Langkah Bank Danamon yang ditempuh Bank Danamon dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian internal dalam pemberian kredit adalah adanya kewajiban terhadap setiap keputusan kredit yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Rekomendasi persetujuan kredit harus disusun secara tertulis berdasarkan analisis kredit dan harus sejalan dengan kesimpulan analisis.
- b. Keputusan persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.

Setiap keputusan kredit yang dikeluarkan oleh pejabat kredit harus selalu dilandasi pada ketentuan kebijakan kredit yang berlaku. Setiap pemberian kredit selalu menuntut pertanggung-jawaban dari pejabat kredit yang memutus baik secara jabatan maupun secara pribadi, sehingga keputusan kredit yang menyimpang dapat diminimalkan sejauh mungkin.

C. Tindakan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Debitur Bermasalah.

1. Faktor – Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah.

Resiko gagal bayar dari debitur merupakan suatu permasalahan resiko kredit yang sangat serius dan tidak dapat begitu saja dengan mudah diselesaikan oleh bank selaku kreditur. Secara prinsip dan mendasar penyebab timbulnya kredit bermasalah sebagai akibat gagal bayarnya debitur atas kredit yang telah diberikan diakibatkan oleh bank mencakup 2 (dua) faktor utama yaitu :

1. Faktor intern

2. Faktor ekstern

Faktor intern sebagai penyebab timbulnya kredit bermasalah lebih banyak didominasi oleh berbagai faktor yang sebagian besar justru berasal dari bank itu sendiri yang antara lain dikarenakan oleh adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemberian Kredit yang cenderung ekspansif.

Pada era awal tahun 1990-an banyak ditemukan pada sebagian besar bank di Indonesia baik itu bank swasta ataupun milik negara telah melakukan kebijakan yang cenderung ekspansif dalam rangka pemberian kredit. Kebijakan yang demikian didasari adanya target tertentu bagi masing-masing bank untuk mengucurkan kredit. Sikap ekspansif telah mengakibatkan bank menjadi lalai dan atau mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian “*prudential banking*” dalam pemberian kredit. Bank tidak selektif dalam menganalisis dan menerima permohonan kredit yang diajukan dengan memberikan banyak kemudahan-kemudahan meskipun kredit yang akan dikucurkan kepada calon debitur mempunyai resiko gagal bayar yang tinggi.

2. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.

Bank pada saat mengucurkan kredit kepada debitur seringkali tidak mengindahkan dan atau mengesampingkan prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh bank merupakan rambu-rambu yang harus secara tegas ditaati. Seringkali bank tidak melakukan analisa kelayakan kemampuan bayar debitur secara menyeluruh baik atas laporan keuangan ataupun tujuan serta penggunaan dari kredit yang diajukannya oleh

calon debitur. Timbulnya penyimpangan kredit dari sistem dan prosedur perkreditan dikarenakan antara lain karena adanya keterbatasan kualitas dan kuantitas pejabat/ staff yang menangani bidang perkreditan.

3. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit.

Sistem administrasi kredit yang baik dengan disertai pengawasan kredit yang intensif merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan bank untuk meminimalisir timbulnya kredit bermasalah. Banyak bank yang tidak melengkapi diri dengan sistem administrasi yang memadai, hal ini mungkin bisa terlihat dari tidak lengkap dan tidak terturnya dokumen-dokumen kredit dan agunan debitur bank. Di bentuknya suatu bagian atau unit tersendiri yang mengurus permasalahan mengenai kelengkapan dokumen merupakan upaya yang tepat dapat dilaksanakan oleh bank dalam rangka tertib administrasi dan pengawasan kredit yang intensif. Bank seringkali ketika kredit telah dikururkan tidak melakukan pengawasan atas peruntukan atau penggunaan kredit debitur.

4. Lemahnya sistem informasi kredit mengenai debitur bank yang bermasalah.

Bank dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian tingkat kesehatan yang baik seringkali justru tidak melaporkan keadaan riil kredit-kredit bermasalah yang ada pada bank yang bersangkutan. Pelaporan kondisi riil keuangan debitur seringkali dimanipulasi oleh pejabat bank dengan harapan tingkat kesehatan bank atas kredit yang telah dikururkan dapat selalu mencerminkan angka yang baik. Sebagai akibat tersebut Bank Indonesia tidak dapat memiliki data-data debitur kredit bermasalah yang ada pada bank-bank secara akurat, yang pada

akhirnya bank-bank lain selain bank yang telah mengucurkan kredit kepada para debitur bermasalah akan kecolongan dengan memberikan kredit kepada para debitur bermasalah.

Faktor intern yang paling dominan yang mengakibatkan tingginya angka kredit bermasalah adalah karena disebabkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan baik dikarenakan pejabat kredit telah mengesampingkan prosedur kebijakan kredit ataupun dikarenakan rendahnya kualitas person atau ketidak-profesionalismenya pejabat kredit bank. Upaya yang paling efektif yang dapat ditempuh untuk meminimal terjadinya penyimpangan prosedur perkreditan selain dengan meningkatkan kualitas person pejabat kredit adalah dengan memformulasikan kebijakan-kebijakan kredit yang meminimal celah-celah penyimpangan yang diback-up dengan sanksi-sanksi baik secara pidana ataupun perdata terhadap pejabat kredit yang tidak mengindahkan kebijakan-kebijakan kredit yang berlaku.

Selain adanya faktor-faktor intern yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah ada juga faktor-faktor penyebab lainnya secara ekstern. Faktor ekstern penyebab timbulnya kredit bermasalah antara lain :

1. Resesi ekonomi yang diikuti menurunnya kegiatan ekonomi, daya beli dan tingginya suku bunga kredit. Terpaan badai krisis ekonomi telah berimplikasi pada lesunya kegiatan sektor-sektor usaha tertentu serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Meningkatnya suku bunga kredit sebagai akibat kebijakan pemerintah dalam kondisi perekonomian yang lesu secara

signifikan akan mengakibatkan debitur mengalami kesulitan finansial dalam pengembalian kredit kepada bank.

2. Adanya itikad tidak baik dari debitur.

Tidak semua pemohon kredit mempunyai itikad baik, karena banyak pemohon kredit justru telah mengelabui bank agar memberikan kredit dan setelah kredit dicairkan peruntukannya adalah bukan untuk pengembangan usaha tetapi justru untuk kepentingan pribadi yang lain (*side streaming*).

3. Keterbatasan kualitas debitur dalam mengelola kredit.

Bank seringkali tidak melakukan penilaian yang layak atas prospek usaha, kondisi keuangan ataupun kapasitas debitur. Sebagai akibat keterbatasan debitur dalam mengelola kredit yang dikucurkan maka resiko gagal bayar debitur-pun akan semakin meningkat.

4. Musibah yang terjadi pada debitur atau kegiatan usaha debitur.

Musibah merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan diluar kekuasaan dan kehendak manusia. Debitur sebagai akibat musibah yang dialaminya sangat mungkin akan mengalami kendala yang serius dalam pengembalian kreditnya kepada bank.

Bank Danamon meskipun secara maksimal mengindahkan prinsip “*prudential banking*” dengan mendasarkan prinsip 5C sebagai dasar dalam penentuan pemberian kredit, namun demikian dalam realita prakteknya di Bank Danamon tetap timbul kredit bermasalah. Kredit bermasalah pasti akan selalu ada pada semua bank. Bank Danamon untuk memenuhi ketentuan NPL sebesar 5%

mulai diakhir tahun 2001 senantiasa mengupayakan perbaikan kinerja semaksimal mungkin. Timbulnya kredit bermasalah karena adanya faktor-faktor intern merupakan suatu permasalahan kredit tersendiri yang tidak dapat dengan begitu mudahnya diprediksikan.

Bank baik pada saat sebelum memberikan kredit ataupun pasca pencairan kredit harus mampu memprediksikan dan atau menganalisa secara menyeluruh atas segenap kemungkinan dan faktor-faktor yang akan berpengaruh serta mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah. Bank diharapkan dengan melakukan analisa yang integratif akan mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang mungkin akan timbul serta melakukan upaya-upaya antisipatif dan menemukan solusi yang paling efektif dan efisien dalam penanganan kredit-kredit bermasalah.

2. Aspek Hukum Penyelamatan Kredit Debitur Bermasalah.

Salah satu tindakan penyelamatan kredit dilakukan dengan merestrukturisasi kredit debitur dengan harapan debitur akan dapat kembali lancar memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Penyelamatan kredit dapat dilakukan antara lain dengan melakukan upaya *restrukturing*, *rescheduling* ataupun *reconditioning* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3 R.

Penentuan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka upaya tindakan penyelamatan kredit, harus terlebih dahulu didahului dengan

adanya penelitian secara menyeluruh mengenai sebab-sebab suatu kredit menjadi bermasalah. Pada setiap proses pemberian kredit kepada debitur selalu mengandung resiko. Secara prinsip tindakan penyelamatan kredit adalah tindakan penanganan kredit bermasalah dengan tujuan mempertahankan dan tetap melanjutkan hubungan dengan debitur.

Secara administratif, kredit yang diselamatkan adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Tindakan penyelamatan kredit dapat ditempuh dengan upaya :

1. **Penjadwalan kembali (*rescheduling*)**, yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk :
 - Debitur dapat menyusun dana langsung “cash flow” secara lebih pasti.
 - Memastikan pembayaran yang lebih tepat.
 - Memungkinkan debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain bank.
2. **Persyaratan kembali (*reconditioning*)**, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Upaya penyelamatan kredit secara *reconditioning* bertujuan untuk :

- Menyempurnakan *legal documentation*.
- Menyesuaikan kemampuan membayar debitur dengan kondisi yang terjangkau oleh debitur (angsuran pokok, denda, bunga, penalti dan biaya-biaya lainnya).
- Memperkuat posisi bank.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- Penambahan dana bank
- Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
- Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Secara khusus *restructuring* bertujuan untuk :

- Memberikan kesempatan kepada debitur untuk berusaha kembali melalui penambahan dana oleh bank, jika permasalahan yang dihadapi oleh debitur adalah berkaitan dengan masalah kesulitan dana.
- Memperbaiki kolektibilitas pinjaman debitur melalui tunggakan bunga, denda, penalti ataupun biaya-biaya lainnya.
- Memperkecil tindakan penyelamatan atas kredit dengan kolektibilitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet. Seluruhnya harus atas persetujuan komite kredit/ sub komite kredit penanganan kredit bermasalah sesuai batas wewenang masing-masing.

Terpaan badai krisis ekonomi yang menimpa dunia perbankan secara *signifikan* sangat mempengaruhi kondisi *portofolio* kredit dari suatu bank. Pada masa krisis ekonomi kegiatan dunia usaha berada pada kondisi *stagnant* sehingga tingkat resiko gagal bayar dari debitur bank-pun juga menjadi semakin meningkat. Pengertian kredit bermasalah tidak dapat dipersamakan dengan kredit macet, cakupan pengertian kredit bermasalah lebih luas dibanding kredit macet, tidak setiap kredit bermasalah merupakan kredit macet namun setiap kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah.

Tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan Bank Danamon dalam kegiatan usaha perkreditan sebagai upaya agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Perpanjangan jangka waktu kredit.
2. Perubahan jadwal pembayaran/ angsuran (termasuk perubahan jumlah angsuran baik atas pokok, bunga, denda atau biaya-biaya lain, perubahan *grace periode*).
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit .
4. Penurunan suku bunga kredit
5. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
6. Penambahan fasilitas kredit.
7. Pengambil-alihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Perpanjangan jangka waktu kredit dan perubahan jadwal pembayaran/angsuran dikenal dengan istilah *Rescheduling*. Tindakan hukum dalam rangka realisasi *rescheduling* dilakukan dengan pembuatan *addendum* terhadap akta perjanjian kredit dan atau akta pengakuan hutang. Pelaksanaan pengurangan tunggakan pokok kredit dapat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Bank meminta kepada debitur atau dalam hal debiturnya perseroan agar debitur atau pemegang saham perseroan melakukan penyetoran *fresh fund* sebagai tambahan modal perusahaan debitur maupun atas sebagian atau seluruh *fresh fund* tersebut dapat digunakan untuk membayar tunggakan pokok kredit.
- b. Perubahan tunggakan pokok kredit (baik perubahan sebagian atau seluruhnya) menjadi pokok kredit yang tidak menunggak dengan mengundurkan jangka waktu pembayaran, sehingga atas kredit yang semula menunggak selanjutnya menjadi tidak menunggak.

Penurunan suku bunga kredit atau perubahan suku bunga kredit atau perubahan syarat-syarat kredit lainnya (seperti provisi, *commitment fee*, perubahan agunan, perubahan *covenant*) baik disertai *rescheduling* atau tidak dapat dikelompokkan dalam pengertian *reconditioning*, dalam hal yang demikian tindakan hukum yang dapat dilakukan atas dokumen kredit yang telah ada adalah pembuatan *addendum* terhadap akta perjanjian kredit dan atau akta pengakuan hutang.

Dalam praktek yang termasuk dalam kategori *reconditioning* adalah : penggantian debitur atau penggantian kreditur. Hal-hal ataupun tindakan hukum

yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *reconditioning* karena penggantian kreditur antara lain :

- a. Pembuatan akta novasi terhadap akta perjanjian kredit atau akta pengakuan hutang dibuat dalam bentuk akta perjanjian kredit atau akta pengakuan hutang baru. Novasi karena perubahan debitur disebut novasi subyektif pasif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - mencantumkan klausula yang menyatakan secara tegas pemberlakuan jaminan yang digunakan untuk menjamin kredit kepada debitur lama tetap dipertahankan untuk menjamin kredit debitur baru yang mengambil-alih, kecuali terhadap sebagian jaminan yang dilepas dan atau diganti.
 - Mencantumkan secara rinci syarat-syarat, *type* dan struktur kredit pada akta novasi ini, seperti mencantumkan yang demikian pada akta perjanjian kredit pada saat pemberian kredit baru.
- b. Melakukan *Review* serta analisis hukum seperti pada waktu pemberian kredit baru kepada debitur.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal terjadi *reconditioning* karena penggantian kreditur antara lain:

- a. Bank mengambil-alih peran sebagai kreditur baru dengan mengambil-alih kredit dari kreditur lama, adapun tindakan hukum yang harus dilakukan oleh bank adalah:
 - membuat akta novasi subyektif aktif dengan mencantumkan klausula yang menyatakan secara tegas pemberlakuan jaminan yang digunakan

untuk menjamin kredit debitur lama tetap dipertahankan untuk menjamin kredit debitur baru yang telah diambil-alih (memenuhi ketentuan pasal 1421 KUH Perdata).

- mencantumkan secara rinci syarat-syarat, *type* dan struktur kredit pada akta novasi ini, seperti mencantumkan yang demikian pada akta perjanjian kredit pada saat pemberian kredit baru.

Jika terjadi penggantian jaminan secara kaseluruhan lazimnya tidak dibuat novasi subyektif aktif tapi dibuatkan akta perjanjian kredit baru dan atau akta pengakuan hutang baru, selanjutnya dalam akta-akta tersebut ditegaskan bahwa realisasi dana kredit digunakan untuk membayar hutang debitur kepada kreditur lama.

Pengurangan tunggakan bunga dikelompokkan sebagai upaya *restrukturisasi* dalam bentuk atau pola *reconditioning* yang antara lain dengan :

- a. Syarat batal yakni setelah diberikan pengurangan tunggakan bunga ternyata debitur tidak beritikad baik untuk memperbaiki kualitas kreditnya, maka tunggakan bunga menjadi kembali pada keadaan semula.
- b. Pola pemberian pengurangan tunggakan bunga dapat ditempuh dengan cara pembebasan tunggakan bunga yang akan dikurangkan dengan pembuatan surat pembebasan bunga dengan syarat batal melalui pembuatan *offering letter* maupun dengan pembuatan *addendum* akta perjanjian kredit dengan merubah ketentuan suku bunga selama jangka waktu tertentu sesuai perhitungan pengurangan yang akan dilakukan.

- c. Mengenai alternatif yang akan dipilih lazimnya didasarkan pada kewenangan yang dimiliki pejabat kredit yang bersangkutan.

Penambahan fasilitas kredit (termasuk perubahan fasilitas kredit) baik disertai *rescheduling* ataupun *reconditioning* maupun tidak termasuk dalam kelompok upaya penyelamatan kredit dengan pola *restructuring*. Tindakan hukum yang harus dilakukan jika diputuskan untuk adanya penambahan/ perubahan fasilitas kredit adalah dengan membuat *addendum* akta perjanjian kredit. Penambahan fasilitas kredit tidak dibenarkan jika digunakan untuk melunasi pokok atau mengkonversi bunga menjadi pokok (*plafondering*).

Pengambil-alihan *asset* debitur sesuai ketentuan yang berlaku merupakan sebagian dari pola *restrukturisasi* kredit, yang secara yuridis dapat diikuti dengan pembuatan *addendum* akta perjanjian kredit dan atau akta pengakuan hutang dalam bentuk akta perubahan jaminan.

Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur hanya dapat dilakukan untuk kredit dengan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet dengan ketentuan :

- a. Penyertaan tersebut harus ditarik kembali jika telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun atau perusahaan tempat penyertaan tersebut telah memperoleh laba *kumulatif* artinya laba setelah diperhitungkan dengan kerugian sebelumnya.
- b. Penyertaan tersebut harus diberikan kolektibilitas sesuai ketentuan.

- c. Harus dihapus-bukukan “*write off*” jika melebihi 5 (lima) tahun tidak dapat dikembalikan.

Tindakan hukum yang harus dilakukan adalah dengan pembuatan akta novasi obyektif, dikatakan demikian karena terjadinya perubahan obyek dari uang piutang menjadi penyertaan modal sementara. Bank yang semula menjadi kreditur selanjutnya menjadi pemegang saham perusahaan debitur.

Upaya awal yang ditempuh bank pada saat dilakukannya upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit debitur yang bermasalah adalah dengan terlebih dahulu melakukan negosiasi, bank berharap dengan negosiasi para debitur tersebut akan secara *transparan* atau terbuka menceritakan kondisi *rill* usaha ataupun perusahaannya baik atas manajemen maupun kondisi financialnya yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjamannya kepada bank. Bank dalam kondisi yang demikian dengan ditunjang profesionalisme yang memadai dalam hal ini baik oleh *Account Officer* (AO) ataupun Pejabat Analisa Kredit harus mampu menemukan solusi efektif dan efisien serta menentukan kebijakan kredit yang paling tepat guna mengatasi permasalahan keuangan yang sedang dihadapi debiturnya. Bank mau tidak mau harus mempunyai paradigma baru dalam pengelolaan kredit, untuk melakukan penagihan kredit lancar yang berpotensi gagal bayar dengan upaya penyelamatan kredit atau harus segera melakukan penyelesaian kredit dalam hal bank mempunyai keyakinan debitur sudah tidak dapat memenuhi lagi kewajiban hutangnya kepada bank. Upaya negosiasi hanya berlaku untuk debitur yang secara nyata beritikad baik *te goeder trouw*, *kooperatif* serta masih berpotensi

menghasilkan *nett cash flow* dengan prospek usaha yang baik. Secara garis besar pada setiap kredit bermasalah ada tiga hal pokok yang harus selalu diperhatikan sebelum upaya penyelamatan kredit dilaksanakan yang dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah *the three C's of problem loan* yang terdiri atas; *carakter, capacity dan condition*²⁹.

Bank sebelum *me-restructure* kredit debitur harus melakukan pemeriksaan dan analisis yang intensif dan integral menyeluruh atas segala aspek yang melekat pada debitur. Sesuai Surat Keputusan Direksi BI No.31/150/Kep/DIR tanggal 12 Nopember 1998 dan SE BDI No.SE:DIR-RMC-010 tanggal 1 Mei 1998 sebelum melakukan *restrukturisasi* kredit, bank harus/wajib melakukan analisis dengan melakukan *review* terhadap aspek hukum debitur/ pemberi jaminan, agunan kredit dan pengikatannya, serta proyek/usaha yang dibiayai dengan kredit yang akan direstrukturisasi secara menyeluruh seperti halnya *me-review* aspek hukum calon debitur sebelum diberikan fasilitas kredit . Proposal restrukturisasi kredit harus memuat secara rinci kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka *restrukturisasi* kredit.

Fokus utama Bank Danamon dalam *me-review* fasilitas kredit debitur yang akan direstruktire antara lain mencakup :

1. Kelayakan debitur sebagai subyek hukum (termasuk usaha yang dibiayai dengan kredit) yang akan di-*restruktire*, yang berwenang melakukan perbuatan hukum, serta persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi.

²⁹ Hasanuddin Rahman, SH, opcit hal. 130

2. Kelengkapan semua dokumen (termasuk validitasnya) dalam hal ini meliputi dokumen perijinan, perjanjian kredit, agunan dan pengikatannya.

3. Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Debitur Bermasalah

Penyelesaian kredit adalah tindakan akhir “*the last action*” yang akan ditempuh oleh bank dalam hal tindakan penyelamatan kredit sudah tidak dapat lagi digunakan. Penyelesaian kredit ditempuh oleh bank jika bank telah memutuskan diri tidak lagi berkeinginan untuk membina hubungan usaha dengan debitur, sehingga mata rantai hubungan usaha antara bank dengan debitur telah terputus. Tindakan penyelesaian kredit dapat ditempuh dengan melalui 2 (dua) tahap penyelesaian yaitu :

- 1). Penyelesaian kredit diluar peradilan “*out of court settlement*”.

- 2). Penyelesaian kredit melalui jalur peradilan.

- 3.1). Penyelesaian kredit diluar Peradilan “*out of court settlement*”

Krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan di Indonesia telah mengubah iklim usaha yang semula mempunyai prospek cerah dan optimal dalam tingkat pengembalian kredit pada bank berubah menjadi iklim usaha yang cenderung mengarah pada peningkatan resiko gagal bayar dari para debitur kepada bank. Pihak bank dalam kondisi yang demikian mengalami kondisi yang serba dilematis antara harus melakukan tindakan penyelamatan kredit atau justru

harus melakukan tindakan penyelesaian kredit dengan menjual asset-asset debitur dan atau penjamin yang digunakan sebagai agunan kreditnya.

Upaya akhir penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan dengan melakukan eksekusi agunan kredit dan atau mengajukan gugatan perdata kepada Debitur tidak selamanya berjalan dengan mulus. Upaya alternatif yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka menyelesaikan kredit debitur yang bermasalah dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan yang sifatnya *persuasif* kepada Debitur. Pendekatan secara *persuasif* demikian lebih dikenal dengan sebutan “*the informal work out*” (*TIWO*).³⁰ *TIWO* seringkali menghasilkan penyelesaian kredit yang justru memberikan *win-win solution* bagi para pihak. Tindakan *TIWO* yang dapat dijalankan oleh bank meliputi :

1. Pendekatan Biaya.

- a. Bank harus mampu menjelaskan kepada debitur bahwa upaya bank dalam penyelesaian kredit secara intern adalah tidak terlalu banyak membutuhkan biaya jika dibandingkan dengan adanya penyelesaian melalui lembaga formal.
- b. Bank memberikan saran kepada Debitur agar bersedia menjual atau mencairkan harta kekayaan lain yang tidak diagunkan ataupun mencari investor yang bersedia melunasi/ menyelesaikan kredit debitur.

2. Pendekatan *psychologis*.

Bank harus mampu melakukan pendekatan *psychologis* dengan debitur dan memberikan pengertian bahwa penyelesaian formal justru akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi debitur karena :

³⁰ Slamet SH, *Aspek Hukum Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit*, (Makalah disampaikan dalam Danamon Remedial Advance Training, Ciawi 24-25 Agustus 2001), hlm..16

- a. Penyelesaian formal dapat dimungkinkan justru akan mencemarkan nama baik debitur yang akhirnya akan mengakibatkan menurunnya kredibilitas debitur dimata rekan-rekan usahanya.
 - b. Memberikan *image* bahwa secara magis kebiasaan cidera janji akan mengakibatkan kendala bagi bisnis debitur atau bahkan akan membawa kesialan.
 - c. Penyelesaian kredit secara in formal akan segera dapat menuntaskan permasalahan dan cenderung tidak berlarut-larut.
3. Dengan menggunakan upaya tekanan atau campur tangan pihak ketiga. Campur tangan atau adanya tekanan pihak ketiga dalam hal ini dari pimpinan perusahaan atau anggota keluarga yang disegani dengan menegur debitur agar debitur segera menyelesaikan kewajiban hutang kepada bank. Cara lain yang dapat ditempuh meskipun agak riskan adalah menggunakan jasa *debt collector*.
4. Motivasi melalui pendekatan religius, upaya ini hanya berlaku efektif terhadap debitur bermasalah yang taat dalam menjalani agamanya.

Pada prinsipnya setiap kredit yang dikucurkan harus dibayar kembali oleh debitur baik atas bunga, denda ataupun biaya-biaya yang lain, sehingga bank dengan segala cara dan upayanya tetap harus melakukan upaya penagihan. Kredit bermasalah merupakan suatu permasalahan serius yang harus diatasi oleh bank karena :

1. *Likuiditas* bank berasal dari pemodal/ giran/ deposan/ penabung dan harus dibayar kembali dan diberikan jasanya kepada nasabah. Tingkat keseimbangan

antara kredit yang dikucurkan dan dana yang dihimpun harus selalu diperhatikan karena dalam hal tersebut dapat mengganggu likuiditas bank.

2. Kredit bermasalah sangat berpengaruh terhadap kualitas kredit suatu bank dan tutur menentukan tingkat kesehatan suatu bank.

Proses penyelesaian kredit diluar peradilan dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu antara lain ; penagihan langsung, pencairan agunan *cash collateral*, penjualan agunan secara sukarela, penagihan hutang melalui pihak ketiga, penagihan dengan melalui jasa iklan/ mass media, penagihan kepada penjamin, pelunasan hutang oleh pihak ketiga. Pada umumnya penagihan langsung dilakukan sendiri oleh bank tanpa menggunakan jasa-jasa atau media bantuan dari pihak ketiga. Upaya penagihan langsung biasanya dilakukan oleh *Account Officer* ataupun *Remidial Officer* dari bank yang bersangkutan dengan mendatangi langsung debitur ataupun mengirim surat, somasi dan panggilan kepada debitur untuk menghadap pejabat bank guna menyelesaikan kreditnya di bank. Pendekatan yang *persuasif* dan sedikit *represif* dari pejabat bank kepada debitur diharapkan akan efektif dalam penyelesaian namun cara ini agak sedikit riskan utamanya atas debitur yang berstatus sebagai karyawan perusahaan.

Pengelolaan kredit *credit management* yang dijalankan oleh bank selalu diupayakan untuk meminimalisir resiko gagal bayar dari para debiturnya karenanya upaya-upaya pengawasan bank untuk memantau dan melakukan *maintenance* atas usaha debitur harus secara *kontinue* dijalankan oleh para *Account Officer (AO)* bank sehingga manakala mulai muncul benih-benih permasalahan

atas kemampuan bayar debitur langkah antisipatif segera dapat dilaksanakan dalam rangka melakukan upaya penyelamatan kredit

3.2). Penyelesaian kredit melalui jalur peradilan .

Penyelesaian kredit dengan melakukan upaya hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh bank manakala kredit debitur sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Penyelesaian kredit melalui prosedur hukum dapat ditempuh dengan melakukan :

- a. Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan negeri.
- b. Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga.

Pelaksanaan penyelesaian kredit melalui mekanisme jalur pengadilan negeri relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan niaga.

a. Penyelesaian Kredit Melalui Jalur Pengadilan Negeri.

Kredit macet dengan tidak dapat dipenuhinya kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada bank merupakan bagian dari lingkup permasalahan sengketa perdata, sehingga apabila para pihak tidak dapat menyelesaikannya maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian secara hukum melalui pengadilan. Upaya bank untuk melakukan tindakan penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan seringkali banyak menemukan kendala-kendala. Penyelesaian kredit melalui pengadilan hanya akan ditempuh oleh bank apabila debitur atau

penjamin debitur masih mempunyai harta kekayaan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang debitur ataupun berlaku bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya kepada bank.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur pengadilan merupakan *the last action* yang ditempuh oleh sebagian besar bank-bank swasta, karena untuk bank-bank milik pemerintah penyelesaian kredit dilakukan melalui PUPN. UU No.49 Prp. Tahun 1960 secara prinsip menegaskan bahwa semua instansi negara atau pemerintah supaya menyerahkan piutangnya yang macet kepada PUPN untuk diurus penyelesaiannya, meskipun tidak tertutup pula penyelesaian melalui peradilan umum.

Upaya penyelesaian kredit oleh bank melalui pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Bank mengajukan gugatan kepada debitur dan atau penjamin karena telah melakukan wanprestasi atas kredit yang telah diberikan oleh bank.
2. Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitur yang telah diikat secara sempurna.

Penyelesaian kredit melalui pengadilan pada umumnya memerlukan waktu yang relatif lama, meskipun sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, namun karena para pihak bersengketa seringkali tidak puas terhadap isi putusan maka

para pihak yang bersengketa akan mengajukan upaya hukum sehingga proses penyelesaiannya pun akan semakin berlarut-larut.

Proses awal yang akan dimulai untuk diajukannya gugatan adalah dengan cara mengajukan gugatan baik secara lisan ataupun tertulis, namun untuk gugatan lisan dewasa ini jarang sekali ada. Pasal 118 ayat 1 sampai dengan ayat 4 HIR menegaskan bahwa gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri di :

- 1). Daerah hukum tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya , tempat tinggal sebetulnya.
- 2). Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan keapad ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain berkedudukan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O).
- 3). Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri didaerah hukum siapa terletak barang itu.

- 4). Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

Dalam realita praktek persidangan seringkali persidangan berjalan dalam proses lama karena tergugat berusaha mengulur-ulur proses jalannya sidang.

Para pihak apabila belum puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pastilah akan mengajukan upaya hukum agar dalam putusan selanjutnya pihak yang merasa dirugikan dan atau dikalahkan dapat dimenangkan. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan :

- 1). Upaya hukum Banding.

Para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri dapat upaya hukum banding selambat-lambatnya 14 hari sejak dibacakannya putusan yang selanjutnya 14 hari setelah permohonan banding diajukan pembanding dapat mengajukan memori banding. Terhadap memori banding yang diajukan pihak terbanding tidak diwajibkan untuk menjawabnya dalam memori banding, namun demikian sebaiknya terbanding juga mengajukan kontra memori banding.

- 2). Upaya hukum Kasasi.

Atas perkara yang diajukan banding selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusan dan bilamana pihak ada pihak yang merasa dikalahkan maka dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Batas waktu

diajukannya permohonan kasasi adalah 3 (tiga) minggu di Pulau Jawa dan Madura serta 6 (enam) minggu untuk diluar Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selanjutnya 14 hari setelah permohonan kasasi diterima maka pemohon kasasi wajib untuk menyerahkan memori kasasi yang selanjutnya 14 hari setelah memori kasasi diterima oleh termohon kasasi maka termohon kasasi wajib untuk mengajukan kontra memori kasasi.

3. Upaya hukum Peninjauan Kembali.

Upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh bilamana dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung pihak yang berperkara merasa berkeberatan atas isi putusan. Pasal 15 UU No.19 Tahun 1964 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa :

Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang.

Yang selanjutnya ditegaskan pula sesuai Pasal 21 UU No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman :

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Peninjauan kembali hanya dapat diajukan kembali yaitu apabila telah ditemukan bukti-bukti baru "*novum*".

Penyelesaian kredit dengan mengajukan gugatan kepada debitur dan atau penjamin yang relatif lama penyelesaiannya dapat dijembatani dengan melakukan upaya mengajukan eksekusi atas agunan kredit debitur dan atau penjamin. Upaya pengajuan permohonan eksekusi inipun tidak selamanya akan berjalan mulus dan lancar karena sangat dimungkinkan adanya bantahan ataupun perlawanan dari pihak-pihak yang berkeberatan atas eksekusi agunan kredit.

Eksekusi agunan kredit hanya dapat diajukan atas agunan kredit yang telah dibebani hak tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan “*preferen*” kepada pemegang hak tanggungan atas kreditur-kreditur lainnya. Sertipikat hak tanggungan karena terhadapnya dibebani titel eksekutorial berupa irrah-irrah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka apabila debitur wanprestasi maka atas agunan kredit tersebut dapat diajukan eksekusi ke pengadilan negeri tempat agunan kredit berada.

b. Penyelesaian Kredit Melalui Jalur Pengadilan Niaga.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan secara signifikan akan mempelopori pailitnya suatu perusahaan ataupun debitur perorangan yang tengah dilibat hutang. Upaya penyelesaian kredit dengan mengajukan permohonan pailit diatur berdasarkan UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang disahkan oleh DPR pada tanggal 24 Juli 1998. Debitur apabila dinyatakan pailit akan kehilangan hak untuk mengelola harta kekayaannya dan atas harta kekayaan tersebut akan dijual guna memenuhi kewajiban hutangnya kepada para debiturnya.

Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan bentuk lain sebagai salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang piutang. Permohonan kepailitan pada dasarnya ditujukan sebagai upaya melakukan sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan para kreditur yang mengarah pada adanya jaminan mekanisme penyelesaian sengketa hutang piutang antara kreditur dan debitur secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui lembaga peradilan berupa adanya pembagian kekayaan debitur melalui kurator untuk memenuhi kewajiban hutangnya sesuai dengan hak-hak dari masing-masing kreditur. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah :

- a. Debitur
- b. Seorang atau lebih kreditur
- c. Kejaksaan (untuk kepentingan umum)
- d. Bank Indonesia (dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank)
- e. Bapepam (dalam hal yang menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek)

Sedangkan kriteria debitur yang dapat diajukan pailit adalah :

- a. Debitur yang mempunyai hutang pada 2 (dua) atau lebih kreditur.
- b. Debitur tidak membayar minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Tujuan PKPU adalah menghindarkan debitur pada keadaan tidak mampu membayar utang untuk sementara waktu agar debitur tersebut tidak dinyatakan

pailit. PKPU diajukan oleh debitur agar debitur diberikan kesempatan untuk mengatur kembali *schedule* pembayaran hutangnya kepada kreditur, dimana pada waktu itu debitur mengalami kesulitan financial sehingga debitur pada saat itu tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur. Apabila debitur mengajukan PKPU maka :

- a. Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dengan menunjuk hakim pengawas.
- b. Mengangkat satu/lebih pengurus untuk mengurus harta debitur dan menyelenggarakan sidang paling lambat pada hari ke 45 terhitung sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.
- c. Bank harus segera menyampaikan tagihan-tagihan dalam kedudukannya sebagai kreditur *konkruen* dengan melampirkan data-data pendukungnya.
- d. Bank mengikuti persidangan dengan memberikan atau menolak PKPU tetap.
- e. Agar dapat memberikan rekomendasi kepada pengurus harta debitur, bank disarankan untuk ikut sebagai panitia kreditur.

Dikabulkannya PKPU yang diajukan oleh debitur sangat bergantung pada rapat kreditur ataupun keputusan para kreditur dipersidangan apakah para kreditur tidak berkeberatan atas PKPU sementara yang diajukan oleh debitur.

Dalam pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian kredit fokus utama yang hendak dicapai adalah keberhasilan dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal dari debitur. Pada setiap upaya penyelesaian kredit hal prinsip yang harus dipersiapkan dan diperhatikan adalah mencakup banyak aspek baik atas

prosedur pemberian kredit, pencairan kredit ataupun dari sisi kelengkapan dokumen kredit serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang akan digunakan sebagai sarana pengesahan *peng-legitimasian* bank yang secara yuridis formal dianggap sebagai pihak yang sah dan benar serta dilindungi hukum untuk menagih kredit debitur dengan menjual asset-assetnya guna pelunasan kreditnya. Kecukupan agunan atau *collateral coverage* dari nilai agunan kredit debitur merupakan instrumen pokok penting lainnya yang mutlak harus diperhatikan sehingga dalam hal bank harus berperkara melawan debitur, bank tidak hanya menang secara diatas kertas *on sheet* dengan tangan hampa karena agunan kreditnya tidak mampu untuk *mengcover* atau mencukupi seluruh kewajiban hutang debitur, namun harus menang dalam arti yang sesungguhnya. Dalam hal demikian *Legal Officer (LO)* bank memegang posisi kunci bank untuk dapat menang dalam perkara yang diajukannya dalam rangka penjualan asset debitur untuk melunasi kredit dan kewajiban debitur kepada bank.

Praktek beracara di pengadilan dalam rangka penyelesaian kredit cenderung terlalu berlarut-larut bahkan tidak menutup kemungkinan bank akan menemui kegagalan dalam penyelesaiannya. Para pihak berperkara dalam hal merasa berkeberatan terhadap isi putusan dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum. Upaya-upaya hukum baik berupa banding, kasasi ataupun permohonan peninjauan kembali serta adanya bantahan ataupun perlawanan *verset* dari para pihak berperkara ataupun pihak ketiga lainnya jelas akan semakin memperpanjang dan memperumit proses penyelesaian kredit yang ditempuh oleh bank. Penyelesaian kredit hanya dilaksanakan untuk menangani

kredit bermasalah yang sudah tidak dapat terselamatkan dan bertujuan untuk tidak memperpanjang hubungan dengan debitur. Penyelesaian kredit melalui lembaga pengadilan merupakan salah satu bentuk *law enforcement* yang dijalankan bank sebagai upaya *the last action* dalam rangka memperoleh tingkat pengembalian kredit yang maksimal .

Pilihan penyelesaian kredit hanya akan ditempuh apabila upaya penyelamatan kredit dalam hal ini upaya *restructuring*, *rescheduling* ataupun *reconditioning* (3R) tidak dapat dilaksanakan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum dilakukannya tindakan penyelesaian kredit antara lain meliputi :

- a. Kepastian bahwa pemberian kredit kepada debitur telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian “*prudential banking* “ maupun telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Bank Danamon yang disusun berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank yang dicanangkan Bank Indonesia.
- b. Kepastian bahwa pemberian kredit yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, masih dalam batas sektor ekonomi, *segmen* pasar serta dalam toleransi resiko yang ditetapkan sesuai kemampuan atau keterbatasan yang ada.
- c. Kepastian bahwa calon debitur tidak beritikad baik untuk melunasi kredit atau hutangnya kepada bank.
- d. Kepastian bahwa agunan kredit yang diserahkan sebagai *second way out* benar-benar meng-*cover* dan memiliki *preferensi* serta *executable*.

- e. Kepastian bahwa bank memiliki jaringan yang memadai pada waktu ditempuhnya upaya penyelesaian kredit.
- f. Kepastian bahwa dokumen hukum yang tersimpan pada bank sudah lengkap dan sempurna.
- g. Kepastian bahwa biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tindakan penyelesaian kredit tidak menjadikan beban kerugian tersendiri bagi bank.

Pada awal sebelum ditempuhnya upaya hukum dalam rangka penyelesaian kredit debitur yang bermasalah upaya tempuh yang dilakukan oleh Bank Danamon adalah dengan melakukan negosiasi dengan debitur agar bersedia melunasi hutangnya kepada bank. Upaya *collection* yang dijalankan oleh bank kepada debitur pada awalnya harus dilakukan secara *persuasif* namun apabila upaya *persuasif* dipandang tidak efektif dan efisien maka upaya *represif* adalah upaya akhir yang harus dilaksanakan oleh bank.

Tingginya angka kredit bermasalah sangat berpengaruh pada kualitas kredit utamanya dalam penentuan tingkat penilaian kesehatan bank. Secara prinsipil kredit yang telah dikururkan oleh bank harus dikembalikan oleh debitur baik atas bunga, denda dan biaya-biaya lain yang timbul (jika ada) tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah diperjanjian para pihak dalam perjanjian kredit dan atau pengakuan hutang. Apabila dalam jangka waktu yang telah diperjanjian debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank maka bank harus melakukan *collection*/ penagihan kepada kreditur. Upaya *collection* yang ditempuh

oleh Bank Danamon atas kredit debitur yang bermasalah dilakukan dengan melakukan :

1. *Collection* diluar proses pengadilan yang ditempuh Bank Danamon antara lain dilakukan dengan melakukan :

- a. Penagihan langsung yang ditempuh oleh Bank Danamon yang pada awalnya dilakukan oleh AO/MO selaku pengelola *account*, namun dalam hal tidak berhasil maka upaya *collection* selanjutnya diserahkan kepada *Remidial Officer Credit* (ROC) pada cabang kordinator yang membawahi. Penagihan langsung dapat pada awalnya didahului dengan somasi yang ditindak-lanjuti dengan upaya *persuasif* dengan secara *face to face* dan secara kekeluargaan.
- b. Pencairan agunan kredit debitur yang bersifat *cash collateral*, agunan kredit debitur yang demikian biasanya dalam bentuk deposito maupun emas yang pengikatan agunan kreditnya dilakukan dengan melalui lembaga gadai.
- c. Penjualan agunan kredit secara sukarela.

Pada saat AO/MO merasa yakin atas kondisi *financial* debitur sudah tidak memungkinkan lagi, maka AO/MO ataupun ROC yang ditunjuk menangani kredit debitur yang bernasalah harus secara *persuasif* membujuk debitur atau penjamin agar menjual agunan kredit atau *asset* lainnya untuk melunasi kredit Debitur kepada bank. Penjualan agunan kredit secara sukarela dari debitur untuk pelunasan hutang hanya dapat

dilaksanakan apabila debitur memang beritikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Bank.

2. *Collection* Melalui Proses Peradilan.

Dalam hal upaya penyelesaian kredit secara damai tanpa melalui proses peradilan tidak berhasil maka upaya tempuh yang dilakukan oleh Bank Danamon adalah melakukan upaya hukum melalui pengadilan yang dilakukan dengan :

a. Permohonan Somasi

Pengajuan permohonan somasi yang dijalankan oleh Bank Danamon merupakan proses awal upaya *collection*, proses penyelesaian kredit melalui somasi meliputi :

- Penyampaian permohonan somasi oleh Bank Danamon kepada Ketua Pengadilan Setempat sesuai domisili hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit dan atau pengakuan hutang.
- Pengadilan Negeri selanjutnya setelah permohonan somasi diterima memanggil Termohon somasi dalam hal ini debitur atau penjamin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan memperingatkan kepada debitur atau penjamin agar segera melunasi kewajiban hutangnya kepada Bank.

Upaya somasi yang ditempuh oleh bank seringkali diabaikan oleh debitur atau penjamin sehingga biasanya oleh bank akan segera ditindak-lanjuti

dengan permohonan eksekusi ataupun pengajuan gugatan/ tuntutan hukum kepada debitur atau penjamin. dalam tidak terjadi penyelesaian

- b. Permohonan eksekusi dapat diajukan atas Akta Pengakuan Hutang ataupun agunan kredit yang telah diberikan *titel eksekutorial* dengan irrah-irrah “Demi Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. *Grosse* Akta Pengakuan Hutang maupun *Grosse* Hak Tanggungan sesuai Pasal 224 HIR dapat dilaksanakan eksekusi dengan tahapan :

- Pengajuan permohonan *fiat eksekusi* atas *Grosse* Akta Pengakuan Hutang ataupun *Grosse* Akta Hak Tanggungan.
- Setelah *fiat eksekusi* diberikan selanjutnya bank akan mengajukan permohonan sita eksekusi.
- Tahapan terakhir dari eksekusi adalah pelaksanaan lelang yang ditindak-lanjuti dengan upaya pengosongan apabila obyek yang dieksekusi belum berada dalam keadaan kosong.

- c. Pengajuan Gugatan Hukum kepada Debitur dan atau Penjamin,

Pengajuan gugatan terhadap debitur yang wanprestasi yang tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada bank memerlukan proses rumit dan panjang, sehingga hampir dipastikan dari segi waktu dan biaya sangat tidak efektif dan efisien. Penguasaan materi dari *Legal Officer* (LO) ataupun Pengacara yang ditunjuk bank dengan didukung sepenuhnya dokumen hukum merupakan kunci keberhasilan bank untuk memenangkan gugatan yang diajukan. Meskipun gugatan telah diputus di

tingkat Pengadilan Negeri namun proses berkekuatan hukum yang tetap atas putusan pengadilan yang dijatuhkan seringkali masih panjang, hal ini dikarenakan masih ditempuhnya upaya-upaya hukum baik upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dari para pihak yang merasa dikalahkan. Waktu yang dibutuhkan tidak dapat dipastikan bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun.

Bagi kalangan perbankan akan lebih mudah, efisien dan praktis apabila atas sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian diluar pengadilan. Berdasarkan laporan Ketua Mahkamah Agung RI Prof Bagir Manan, SH dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 tanggal 1 November 2001 disebutkan bahwa tunggakan perkara kasasi dan PK di MA sampai September 2001 masih sebanyak 16.233 perkara.³¹ Data terakhir yang diperoleh dari Bank Danamon pada tahun 2001 jumlah perkara yang ditangani oleh Sub. Divisi Hukum yang berkaitan dengan permohonan eksekusi hak tanggungan terdapat 96 perkara dan untuk gugatan hukum atas wanprestasinya debitur terdapat 11 perkara.

Bank Danamon sedini mungkin menghindari upaya penyelesaian kredit melalui proses peradilan baik melalui permohonan eksekusi ataupun pengajuan gugatan, dikarenakan adanya pertimbangan biaya, waktu yang relatif lama serta adanya ketidak-pastian bahwa Bank

³¹ Arif Budiman SH dan Chisca Mirawati SH (Makalah disampaikan dalam Workshop “Peran Legal Officer dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan” Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta 13 November 2001), hlm.6

Danamon akan menjadi pihak yang menang dalam gugatan yang diajukan. Suatu perkara yang diajukan oleh bank meskipun secara *juridis formil* dan *juridis materiil* bank pada posisi yang kuat namun dalam realita dipersidangan ketika putusan hukum dibacakan keadaan dapat menjadi berbalik karena pihak bank justru dikalahkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang lemah dasar hukumnya.

Bank Danamon dalam penyelesaian kredit bermasalah yang cenderung melakukan pendekatan *person to person* kepada debitur untuk secara sukarela melunasi kreditnya kepada bank baik secara tunai sekaligus atau pembayaran berkala maupun dengan penjualan ataupun pengambil-alihan asset. Upaya collection dilakukan oleh ROC yang ditunjuk untuk menangani *account*, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan oleh Staff Litigasi Sub. Divisi Hukum maupun pengacara yang ditunjuk.

4. Sistem Penanganan Kredit Bermasalah.

Penanganan kredit bermasalah secara dini merupakan langkah riil yang harus ditempuh dalam rangka penanggulangan kredit bermasalah. Langkah awal yang menjadi perhatian dalam rangka penanggulangan kredit bermasalah adalah dengan :

- a. mengetahui sumber/ akar pemasalahan.
- b. Memahami bahwa setiap permasalahan kredit adalah tidak selalu sama antara yang satu dengan yang lain.

- c. Melakukan pengawasan secara *intensif* atas outstanding debitur serta membatasi penggunaan fasilitas kredit yang belum dipergunakan.
- d. Memperketat kontrol yang ditindak-lanjuti dengan permintaan :
 - rekening koran terakhir .
 - laporan *inventory* secara teratur.
 - Laporan tagihan hutang.
 - *Cash flow* (neraca & laba rugi)
- e. *Check on the spot visit* yang dalam hal ini dilakukan dengan kunjungan rutin ketempat usaha debitur.
- f. Mengevaluasi semua dokumen hukum dan dokumen terkait lainnya

Dalam rangka lebih efektifnya tindakan penyelamatan dan atau tindakan penyelesaian kredit maka Bank membutuhkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur secara teknis penanganannya. Ketentuan ketentuan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai parameter/ tolak ukur yang standart sebagai acuan penanganan kredit bermasalah baik dalam rangka pengawasan ataupun evaluasi.

Efektifitasnya penanganan kredit bermasalah sangat bergantung pada sistem penanganan kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh bank ataupun adanya peraturan-peraturan yang memadai yang dapat dijadikan acuan dalam tata cara/ teknis penanganan kredit bermasalah yang terjadi. Secara administratif kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, lancar tetapi menunggak dan macet.

Upaya tempuh yang dapat dilaksanakan oleh Bank Danamon dalam rangka mengoptimalkan dan lebih mengefektifkan penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan melalui sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Penanganan kredit bermasalah dengan sistem sentralisasi adalah penanganan kredit bermasalah yang langsung dijalankan oleh kantor pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Divisi Remedial. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem penanganan kredit bermasalah di Bank Danamon antara lain dilakukan dengan :

1. Sistem sentralisasi penanganan kredit bermasalah awalnya hanya berlaku di *Lending Center* Jakarta dimana seluruh teknis penanganan kredit bermasalah di *Lending Centre* Jakarta dilaksanakan oleh *Remedial Officer* (RO) dari Divisi Remedial.
2. Pada awalnya penanganan kredit bermasalah di *Lending Center* Jakarta ditangani oleh Remedial Officer (RO) dari Divisi Remedial Kantor Pusat namun sering dengan semakin banyaknya kredit bermasalah yang timbul serta keterbatasan personil dari ROC Divisi Remedial maka dilaksanakanlah sistem desentralisasi dimana penanganan kredit bermasalah diserahkan kepada ROC pada Cabang Koordinator *Lending Centre* dengan dibawah koordinasi RO dari Kantor Wilayah.
3. Jika menurut pertimbangan Cabang (diluar *Lending Centre* Jakarta) diperlukan penanganan debitur bermasalah secara langsung oleh Divisi Remedial, maka Cabang yang bersangkutan dapat mengusulkan penanganan debitur tersebut melalui pengisian formulir Ringkasan

Permohonan Penyelesaian Kredit KLDM (RPPK) ataupun Memorandum Ringkasan Penyelesaian Kredit (MRPK)

Dasar pertimbangan cabang menyerahkan penanganan kredit bermasalah kepada Divisi Remedial antara lain meliputi :

1. Cabang telah melakukan usaha-usaha penyelamatan/penyelesaian kredit kredit akan tetapi menemui kendala/ kesulitan dalam penanganannya.
2. Domisili debitur dan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan debitur lebih mudah dijangkau oleh Kantor Pusat (Divisi Remedial).
3. Atau alasan-alasan lain yang menurut pertimbangan tersendiri dari Divisi Remedial sehingga penanganan debitur kredit bermasalah harus ditangani secara langsung oleh Divisi Remedial sendiri.

Divisi Remedial dalam rangka menjalankan tugas-tugas pelaksanaan penanganan kredit debitur bermasalah dapat minta bantuan dari cabang yang ada diluar *lending Centre* Jakarta yang antara lain meliputi tindakan-tindakan untuk :

1. Hunting/ pencarian debitur.
2. Penarikan jaminan.
3. Pencarian informasi pihak lain yang berkaitan dengan penanganan debitur yang bersangkutan.
4. Pencarian calon pembeli jaminan ataupun

5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang menurut Divisi Remedial lebih efektif dan efisien dilakukan oleh cabang di luar *Lending Centre* Jakarta.

Selain penanganan kredit bermasalah secara sentralisasi, sistem penanganan kredit bermasalah juga dapat ditempuh dengan sistem desentralisasi dengan memberikan wilayah/cabang wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan penyelamatan dan atau penyelesaian kredit debitur yang bermasalah. Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal itu antara lain meliputi :

1. Sistem desentralisasi penanganan kredit bermasalah hanya berlaku dicabang-cabang yang ada dibawah unit kerja wilayah (diluar *Lending Centre* Jakarta).
2. Secara teknis penanganan kredit bermasalah dicabang-cabang tersebut dilaksanakan oleh Remedial Officer Credit (ROC) cabang atau pejabat lain yang ditunjuk/ bertugas menangani kredit bermasalah.
3. Jika menurut pertimbangan wilayah/cabang (diluar *Lending Centre* Jakarta) diperlukan penanganan debitur bermasalah secara langsung oleh Divisi Remedial, maka wilayah/cabang yang bersangkutan dapat mengusulkan untuk melakukan penanganan kredit debitur bermasalah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Wilayah/cabang dapat meminta bantuan Divisi Remedial dalam menangani debitur bermasalah tanpa sepenuhnya menyerahkan penanganan debitur tersebut jika menurut pertimbangan cabang satu atau lain sesuai tingkat kesehatan pinjaman debitur dicabang.

Optimalisasi penanganan kredit bermasalah dapat tercapai apabila didukung oleh ketentuan-ketentuan yang teknis memadai, sehingga terdapat suatu tolak ukur yang dapat digunakan sebagai *parameter standart* yang dapat dipakai sebagai acuan, pemantauan dan evaluasi dalam setiap penanganan kredit bermasalah. Proses penanganan kredit bermasalah antara lain meliputi :

1. Kegiatan penyelamatan ataupun penyelesaian debitur bermasalah harus selalu didahului dengan pengumpulan data dan analisis terhadap aspek-aspek :

- a. Karakter/ itikad debitur.

- b. Kondisi keuangan yang meliputi antara lain :

- 1). Jumlah hutang.

- 2). *Cash flow* (dana langsung dari operasional perusahaan).

- 3). Kemampuan membayar kewajiban.

- 4). Sumber pembayaran kewajiban.

- 5). Aktivitas rekening korang (RK).

- c. Kondisi dokumen-dokumen hukum yang meliputi :

- 1). Perjanjian Kredit.

- 2). Pengakuan Hutang.

- 3). Pengikatan Jaminan ; APHT, FEO, Gadai, Cessie.

- 4). Penanggungan Hutang ; Personal Guarantee dan Corporate Guarantee

- d. Kondisi jaminan yang meliputi :
 - 1). Penilaian kembali jaminan “*reapraise*”
 - 2). *Marketability* jaminan (pemasaran jaminan)
 - 3). Kondisi fisik jaminan.
 - 4. Kelengkapan dokumen jaminan.
 - e. Kondisi hubungan debitur dengan relasi bisnis.
 - f. Koreksi hubungan debitur dengan bank atau kreditur lainnya .
2. Berdasarkan pertimbangan atas hasil analisa yang diperoleh, maka usulan penanganan kredit bermasalah dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) upaya tempuh yang meliputi :
- a. Penyelamatan kredit yang meliputi :
 - 1). Penjadwalan kembali (*rescheduling*).
 - 2). Persyaratan kembali (*reconditioning*).
 - 3). Penataan kembali (*restructuring*).
 - b. Penyelesaian kredit yang meliputi :
 - 1). Pembayaran/ pelunasan tunai (*cash collection*).
 - 2). Pengambil-alihan agunan.
 - 3). Penyelesaian melalui saluran hukum (eksekusi).
 - 4). Penghapusbukuan/ pembebasan (*write off*)

3. Ada kemungkinan terdapat sisa kewajiban yang terjadi sebagai akibat dari negosiasi dengan debitur dalam penyelamatan kredit (*rescheduling/ restructuring/ reconditioning*) dan sisa kewajiban yang sulit ditagih setelah dilakukannya usaha-usaha sisa kewajiban yang sulit ditagih setelah dilakukannya usaha-usaha sisa kewajiban tersebut harus diusulkan penghapusbukuan/ pembebasan jaminan.

Kredit debitur yang akan direstrukturisasi harus dikaji secara *integral* dan *komprehensif* guna mendapatkan perhatian yang lebih seksama dengan dilakukannya analisa dan evaluasi yang secara garis besar mengacu pada prospek usaha debitur yang masuk dalam kategori sektor ekonomi bukan merupakan sektor industri yang dihindari dan mempunyai resiko pada kondisi gagal bayar debitur atas pengembalian kreditnya kepada bank serta didasarkan pada kemampuan membayar *source of repayment* sesuai proyeksi arus kas dari debitur. Kredit yang direstruktural harus dianalisis secara mendalam dan terus dipantau kegiatan usahanya secara berkala. Evaluasi secara rinci mengenai penyebab debitur mengalami kondisi gagal bayar harus selalu didasarkan pada laporan keuangan, arus kas, proyeksi keuangan, kondisi pasar serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur. Efisiensi manajemen debitur diperlukan manakala *restrukturisasi* organisasi perusahaan debitur yang secara nyata tidak ditempati oleh orang-orang yang berkompeten dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip manajemen yang handal dan profesional.

Ketentuan dan kriteria penyelamatan kredit bermasalah dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Tindakan penyelamatan kredit adalah tindakan penanganan kredit bermasalah dengan tujuan mempertahankan dan tetap melanjutkan hubungan dengan debitur, melalui suatu kerja-sama. Perjanjian antara pihak bank dengan debitur untuk menetapkan kerangka pembayaran kembali kewajiban-kewajiban debitur.
2. Secara administratif kredit yang diselamatkan adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar tanpa tunggakan.
3. Bentuk penyelamatan kredit dapat berupa :
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.
 - c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :
 1. penambahan dana bank

2. konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
3. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Pemantauan kredit bermasalah diupayakan sebagai upaya untuk senantiasa mengetahui posisi kolektibilitas pinjaman debitur di cabang dan status penanganan dari setiap debitur kredit yang bermasalah. Bank Danamon secara kontinue meningkatkan fokus pengelolaan risiko dan penanganan kredit sebagai komponen utama kepatuhan terhadap asas prudential banking. Berbagai risiko yang akan selalu dihadapi Bank Danamon dalam menjalankan usaha perbankan meliputi resiko pasar, resiko likuiditas, risiko kredit dan risiko operasional.

Risiko pasar diantaranya timbul sebagai akibat adanya perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing, gejolak pasar modal maupun resiko pasar lainnya. Risiko likuiditas yang dihadapi bank mencakup kewajiban bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya setiap saat atau dalam jangka waktu pendek sehingga dibutuhkan kemampuan manajerial dalam pengelolaan sumber dana.

Risiko kredit harus mendapatkan perhatian yang sangat serius yaitu mencakup kemungkinan debitur-debitur Bank Danamon yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, sedangkan resiko operasional berkaitan dengan kerugian-kerugian tak terduga yang disebabkan *human*

error atau human teknologi sebagai akibat kegagalan sistem ataupun standart prosedur kerja yang kurang memadai.

Bank Danamon dalam mengantisipasi segala risiko yang timbul telah membentuk komite-komite atau divisi-divisi yang bertugas untuk meminimase segala kemungkinan risiko yang akan timbul. Restrukturisasi kredit merupakan salah satu elemen utama program pembenahan sektor perbankan indonesia saat ini. Terjadinya kredit macet sangat berpengaruh terhadap kualitas aktiva produktif dan mengurangi kemampuan bank untuk meningkatkan profitnya karena adanya penyisihan kerugian.

Pada tahun 2000 Bank Danamon telah mengalihkan seluruh kredit kategori 5 termasuk yang berasal dari Bank Peserta Merger ke BPPN kecuali Bank Tiara karena telah direkapitalisasi pada tahun 1999. Penyelesaian kredit bermasalah kategori 5 merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan oleh Bank Danamon. Divisi Remedial selaku divisi yang secara langsung membidangi pengananan kredit bermasalah terbagi dalam 3 (tiga) sub divisi yang menangani restrukturisasi kredit, kredit aktiva jaminan yang diambil-alih, serta sistem informasi kredit. Upaya pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk memaksimalkan kredit yang diselamatkan dan meminimalkan resiko kerugian atas kredit yang tidak dapat terselamatkan.

Bank Danamon untuk mencapai kualitas kredit yang baik dengan menghindari resiko kredit sejauh mungkin selain memelihara kelengkapan dokumen hukum secara tertib dan aman juga harus melakukan antisipasi

resiko. Antisipasi resiko dilakukan untuk melakukan deteksi dini dan penentuan kebijakan pengamanan kredit yang disusun secara tertulis oleh AO dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengungkapan *Risk Area* yang mencakup semua resiko kredit baik dari segi manajemen, usaha, keuangan maupun makro ekonomi.
- b. Sistem Deteksi Dini (*Early Recognition Watch List*) dengan mencatat semua gejala yang dianggap sebagai penyebab menurunnya kualitas kredit dengan harapan dapat segera ditempuhnya suatu kebijakan kredit untuk menyelamatkan atau menyelesaikan kredit.
- c. Klarifikasi atas *Unfauvourable Info* dalam pengertian setiap informasi negatif mengenai debitur harus dapat dijelaskan secara tertulis dan disertai dengan tindak-lanjut yang diperlukan.
- d. *Reminder System* yang dilakukan untuk memperoleh tindak-lanjut atas setiap ketidak-lengkapan dokumentasi kredit dan legal maupun keterlambatan pemenuhan kewajiban.
- e. Klasifikasi Pinjaman (*Reklasifikasi dan Deklasifikasi Kredit*) terhadap debitur yang sudah menunjukkan gejala menurun harus dilakukan sedini mungkin.
- f. *Phase Out Program* sebagai rencana atau tindakan unit kerja untuk *phase out* atas *non target market* dan *non perfoming loan* disertai dengan *target date* yang jelas.

Penanganan yang intensif sangat diperlukan bagi kredit yang telah menunjukkan gejala kurang sehat namun masih mempunyai prospek usaha yang bagus untuk dapat dilakukan upaya penyelamatan kredit ataupun ditempuhnya upaya penyelesaian kredit jika kredit debitur tersebut sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Setiap pejabat kredit diharapkan mempunyai pandangan dan persepsi yang sama dalam menangani kredit bermasalah melalui pendekatan yang didasarkan pemikiran bahwa :

- a. Sistem manajemen kredit bermasalah harus dibuat secara transparan sehingga mencerminkan status dan kondisi kredit bermasalah yang sesungguhnya.
- b. Tindakan pendeteksian kemungkinan timbulnya kredit bermasalah harus dilakukan sedini mungkin dan *continue* agar kerugian bank dapat ditekan seminimal mungkin.
- c. Penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian, terencana dan konsisten sehingga akan memberikan hasil yang cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- d. Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan atas dasar prinsip pengembalian yang maksimum (*maximun recovery*)
- e. Penanganan kredit bermasalah harus sesuai dengan prosedur kredit yang berlaku dan diberlakukan terhadap semua debitur tanpa ada pengecualian.

Setiap pemberian kredit selalu mengandung resiko kredit. Upaya tempuh yang dijalankan oleh bank dalam rangka meminimal serendah mungkin kerugian yang timbul sebagai akibat adanya kredit bermasalah dapat dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Bagi kredit bermasalah atas debitur yang masih mempunyai prospek usaha dan kemampuan membayar yang dapat diandalkan dapat dilakukan upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit dengan didasarkan pertimbangan bahwa :

- perusahaan mempunyai potensi untuk menghasilkan arus kas yang positif.
- Prospek usaha, pasar produk atau jasa yang *marketable*.
- Adanya peluang peningkatan daya saing dan efisiensi.
- Debitur bersikap jujur dan beritikad baik serta mampu bekerjasama dengan bank.

b. Terhadap kredit bermasalah yang sudah tidak mempunyai prospek usaha dan tidak dapat diselamatkan lagi sehingga bank sudah tidak berkeinginan lagi untuk membina hubungan usaha dengan debitur maka harus segera dilakukan :

- penyelesaian kredit secara tunai.
- penyelesaian kredit melalui pengambil-alihan asset
- penyelesaian kredit melalui proses hukum

- c. Pasca program penyelesaian kredit bermasalah dijalankan maka harus dilakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaannya secara berkala atau periodik, apabila hasil yang dicapai tidak seperti yang diharapkan maka harus segera dilakukannya upaya alternatif lainnya dalam rangka penyelesaian kredit.

Urgensinya tindakan penyelamatan dan penyelesaian kredit tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai permasalahan kredit biasa. Proses penyelamatan kredit yang dijalankan oleh bank selama ini tidak selalu dapat berjalan efektif dalam tingkat pengembalian kredit dikarenakan keterbatasan dari Pejabat kredit bank yang tidak mampu menelaah dan menganalisa secara *integral komprehensif* faktor-faktor penyebab sebagai akar timbulnya kredit bermasalah.

Dalam pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian kredit fokus utama yang hendak dicapai adalah keberhasilan dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal dari debitur. Pada setiap upaya penyelesaian kredit hal prinsip yang harus dipersiapkan dan diperhatikan adalah mencakup banyak aspek baik atas prosedur pemberian kredit, pencairan kredit ataupun dari sisi kelengkapan dokumen kredit serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang akan digunakan sebagai sarana pengesahan *peng-legitimasian* bank yang secara yuridis formal dianggap sebagai pihak yang sah dan benar serta dilindungi hukum untuk menagih kredit debitur dengan menjual asset-assetnya guna pelunasan kreditnya. Kecukupan agunan atau *collateral coverage* dari nilai agunan kredit debitur merupakan instrumen pokok penting lainnya yang mutlak harus diperhatikan sehingga dalam hal bank harus berperkara melawan debitur, bank tidak hanya

menang secara diatas kertas *on sheet* dengan tangan hampa karena agunan kreditnya tidak mampu untuk *mengcover* atau mencukupi seluruh kewajiban hutang debitur, namun harus menang dalam arti yang sesungguhnya. Dalam hal demikian *Legal Officer (LO)* bank memegang posisi kunci bank untuk dapat menang dalam perkara yang diajukannya dalam rangka penjualan asset debitur untuk melunasi kredit dan kewajiban debitur kepada bank.

Praktek beracara di pengadilan dalam rangka penyelesaian kredit cenderung terlalu berlarut-larut bahkan tidak menutup kemungkinan bank akan menemui kegagalan dalam penyelesaiannya. Para pihak berperkara dalam hal merasa berkeberatan terhadap isi putusan dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum. Upaya-upaya hukum baik berupa banding, kasasi ataupun permohonan peninjauan kembali serta adanya bantahan ataupun perlawanan *verset* dari para pihak berperkara ataupun pihak ketiga lainnya jelas akan semakin memperpanjang dan memperumit proses penyelesaian kredit yang ditempuh oleh bank. Penyelesaian kredit hanya dilaksanakan untuk menangani kredit bermasalah yang sudah tidak dapat terselamatkan dan bertujuan untuk tidak memperpanjang hubungan dengan debitur. Penyelesaian kredit melalui lembaga pengadilan merupakan salah satu bentuk *law enforcement* yang dijalankan bank sebagai upaya *the last action* dalam rangka memperoleh tingkat pengembalian kredit yang maksimal .

Sebagai upaya akhir dari tindakan penyelesaian kredit bermasalah yang dapat dilakukan oleh bank untuk meminimal sedini mungkin atas kerugian yang harus diderita bank, maka atas kredit yang bermasalah tersebut dapat dilakukan

penghapusbukukan “*write off*” atau penghapustagihan yang diputuskan secara selektif dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Bab V

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil analisis tersebut dalam Bab IV diatas dapat kiranya disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tindakan penyelamatan kredit dilakukan dengan merestrukturisasi kredit debitur dengan harapan debitur akan dapat kembali lancar memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Penyelamatan kredit dapat dilakukan antara lain dengan melakukan upaya *restrukturing*, *rescheduling* ataupun *reconditioning* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3 R.

Secara administratif, kredit yang diselamatkan adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolekbilitas lancar. Tindakan penyelamatan kredit dapat ditempuh dengan upaya 3 R yaitu :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran.
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
 - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :
 - Penambahan dana bank
 - Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
 - Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
2. Tindakan penyelesaian kredit hanya akan dilaksanakan jika tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan bank tidak dapat memulihkan kualitas kredit debitur. Efektif dan effisiennya tindakan penyelesaian kredit untuk mendapatkan *maksimum recovery* seringkali justru dapat tercapai melalui upaya negosiasi yang sifatnya *persuasif* dengan melakukan *collection* secara berkala, dalam hal upaya *collection* tidak berhasil maka upaya awal yang dapat ditempuh oleh bank adalah dengan melakukan penjualan asset debitur/ penjamin secara sukarela. Upaya penyelesaian kredit melalui jalur peradilan sebagai “*the last action*” atau upaya akhir yang harus ditempuh manakala

debitur/ penjamin tidak bersedia melakukan penjualan asset secara sukarela, namun upaya tempuh ini seringkali justru tidak efektif dan efisien karena dalam pelaksanaannya akan dapat memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang relatif tinggi juga.

B. Saran.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kredit bermasalah dalam dunia perbankan maka saran-saran yang dapat disampaikan antara lain :

1. Mengingat tingginya angka kredit bermasalah maka kualitas intelektual dan moral pejabat kredit dari bank yang mengucurkan kredit harus dipilih pada *person* yang mempunyai *integritas* tinggi dan mampu bertindak secara profesional, pejabat kredit harus mampu bertindak secara lebih selektif dan profesional pada saat proses pemberian kredit kepada debitur dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian “*prudential banking*” yang selanjutnya atas kredit yang telah dikucurkan harus dilakukan tindakan pengawasan kredit yang sifatnya *kontinue*, sehingga setiap gejala-gejala kredit bermasalah dapat dideteksi secara lebih dini untuk selanjutnya ditentukan solusinya.
2. Sebelum dilakukannya penyelesaian kredit melalui saluran hukum hendaknya bank terlebih dahulu melakukan *approach* secara *person to person* melalui negosiasi-negosiasi yang *persuasif* untuk menumbuhkan kesadaran debitur

agar secara sukarela segera melunasi pinjaman hutangnya kepada bank. Pada saat dilakukan pendekatan kepada debitur maka bank harus memberikan penekanan yang tersamar “*absurd pressure*” kepada debitur bahwa upaya penyelesaian kredit melalui peradilan justru akan memberikan dampak yang kurang baik bagi debitur baik secara moral, social maupun ekonomis.

Daftar Pustaka

Buku

- Thomas Suyatno, Kelembagaan Bank, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta 1994
- Hartono Soerjopratiknjo, Hutang-Piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran Dan Jaminan Hypotik, PT. Mustika Wikasa Yogyakarta, 1994.
- R. Wiryono Projodokoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung 1993.
- Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Ny. Retno Wulan Sutantio. dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989.
- R. Subekti,. Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987
- Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta Intermasa 1989
- Jaminan-jaminan untuk e,berian Kredit menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996
- Iswandoro, Uang dan Bank,
- H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Yogyakarta 2000
- Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung : Alumni 1978

- Rahmadi Usman, Aspek-Apek Hukum Perbankan Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001
- Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta 1997.
- Ch. Gatot Wardoyo, Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Majalah Bank dan Manajemen, edisi Nopember/Desember 1992
- Qiron A. Syamsudin Meliala, 1985 Pokok-pokok Perjanjian beserta perkembangannya, Liberty, Yogyakarta.
- Widjarnako, 1993 Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia , PT. Balai Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Salim H. HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- R. Setiawan, Pokok Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta Bandung 1994.
- Rony Hanitio Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Gahlia Indonesia Jakarta 1988.
- Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, cetakan 3 Jakarta 1998.
- Soetrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM Yogyakarta 1995.

Interneet.

www.danamon.co.id, “Informasi Perusahaan”

www.danamon.co.id, “Layanan dan Produk Informasi”

www.danamon.co.id, “Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Danamon”

Makalah

Sub Divisi Bidang Hukum Kantor Pusat Bank Danamon , Aspek Hukum Kredit,
Sentra Pelatihan IV Jateng & DIY, 1996.

Sub Divisi Remedial Kantor Pusat Bank Danamon, Penyelamatan Kredit Bermasalah Dalam Masa Krisis, Sentra Pelatihan Kanwil 03 Bandung 1999.

FX. Indarko Kunto Wicaksono, Eksekusi Obyek Hak Tanggungan Atas Fasilitas Kredit Belum Jatuh Tempo Pada Bank Danamon Kanwil IV, Solo 1997.

Pradjoto, Instrument Haircut Dalam Restrukturisasi Kredit Macet , Makalah disampaikan dalam Kuliah Hukum Perbankan, Magister Hukum Atmajaya Yogyakarta 2001

Slamet, Aspek Hukum Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit, Sub. Divisi Bidang Hukum PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Makalah disampaikan dalam Danamon Remedial Advance Training 2001

Peraturan Perundang-undangan

- *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*
- *Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*
- Bank Indonesia , *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/ 16/ UPPB tanggal 27-02-1998*